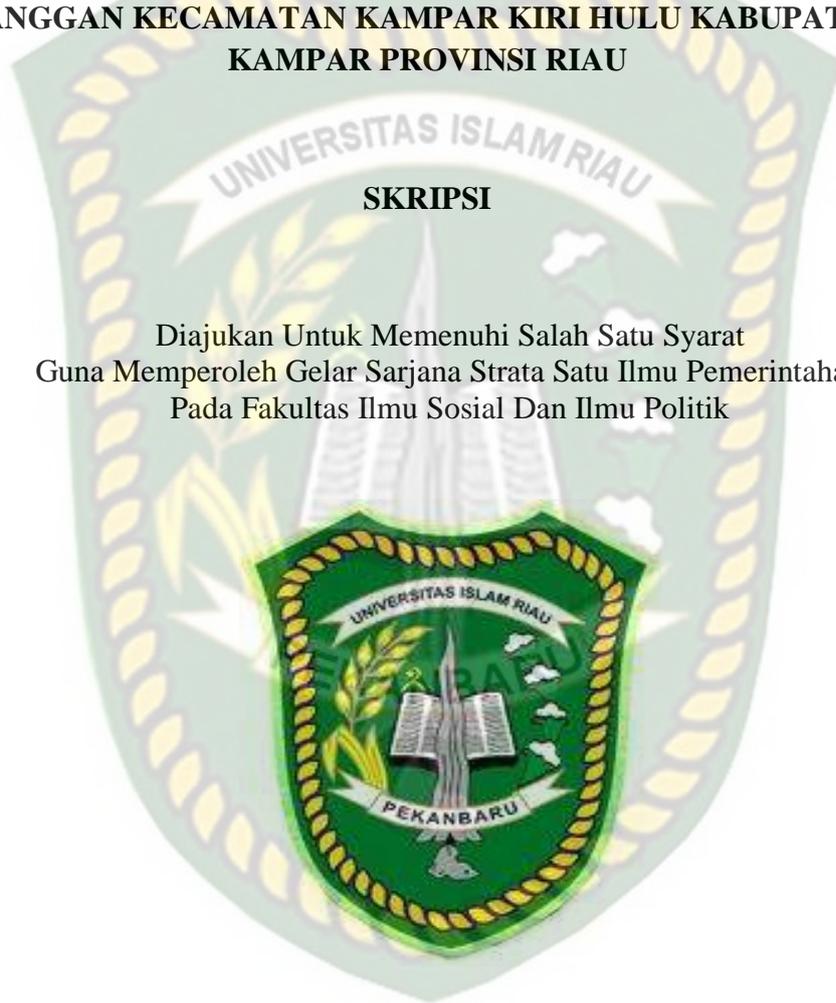


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGELOLAAN EKOWISATA BATU BELAH DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BATU
SANGGAN KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN
KAMPAR PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



FERRY ARGANDI
NPM : 147310104

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ferry Argandi
NPM : 147310104
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 19 Oktober 2020

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, M.Si


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ferry Argandi
NPM : 147310104
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarja.

Pekanbaru, 19 Oktober 2020

Ketua,



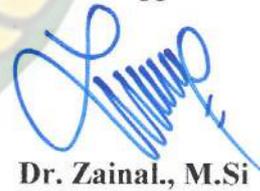
Budi Muliando, S.IP., M.Si

Sekretaris,



Nina Yuslimi, S.IP., M.Si

Anggota



Dr. Zainal., M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

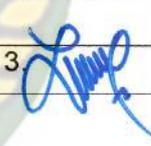
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 435 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 02 Sept 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 03 Sept 2020 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ferry Argandi
NPM : 147310104
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pengelolaan Ekowisata Batu Belah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.**

Nilai Ujian : Angka : " 82,7 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Budi Mulianto, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Nina Yuslimani, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 03 Sept 2020
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ferry Argandi
NPM : 147310104
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 19 Oktober 2020

An. Tim Penguji

Ketua,

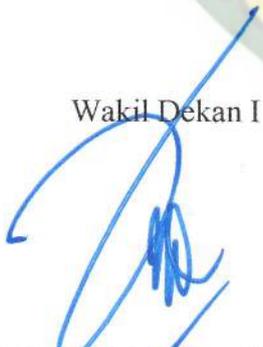

Budi Muliando, S.IP., M.Si

Sekretaris,


Nina Yuslimi, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian Skripsi ini yang berjudul. **“Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau”**. Shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing dengan sepenuh hati dan memberikan banyak pengajaran yang luar biasa kepada saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
6. Kepada Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Kepala BBKSDA Provinsi Riau, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Desa Batu Sangam, PokJa Ekowisata, beserta seluruh masyarakat Desa Batu Sangam yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut serta telah mempermudah dalam pengambilan data yang di gunakan dalam penelitian ini agar penelitian ini baik dan jelas.
7. Kepada Ayahanda Sumedi dan Ibunda saya Megawati, Paman dan Bibi saya, adik-adik dan keluarga tercinta karena telah banyak memberikan semangat dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
8. Kepada orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai. Senior-Senior baik diorganisasi Internal maupun Ekternal, Teman-teman Ilmu Pemerintahan

B angkatan 2014 yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada saya.

9. Kepada teman seperjuangan saya di Organisasi HIMIP periode 2016-2018, adik-adik HIMIP Fisipol UIR, teman-teman pengurus BEM Fisipol UIR 2018-2019 serta teman-teman saya di Organisasi Eksternal IPNU PC Kota Pekanbaru yang juga telah banyak memberikan motivasi dan juga bantuan didalam pembuatan Skripsi serta bantutan ilmu yang dibrikan untuk menyelesaikan Skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya yang diberikan.
10. Tidak lupa kepada saudara seperjuangan saya Hengky Primana, Satya Firdaus, ST, Benny Setiawan Sutrisno, SE, Zamroni dan Muhammad Nurdin yang telah memberikan sokongan dan dukungan terbaik kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebagaimana mestinya.

Akhir kata hanya ucapan terimakasihlah yang bisa diberikan oleh penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa pihak yang membantu kelancaran penulisan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wallahulmuwafiq ila Aqwamith Thoriq, wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 5 Agustus 2020

Penulis

Ferry Argandi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRAC.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan.....	8
1. Pemerintah.....	8
1.1. Pengertian Pemerintahan	8
1.2. Fungsi Pemerintahan.....	9
1.3. Urusan Pemerintahan	10
1.4. Pemerintahan Sebagai Ilmu	12
2. Pemerintahan Daerah	13
2.1. Pengertian Pemerintahan Daerah	13
2.2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	14
2.3. Pentingnya Desentralisasi	17
3. Pemerintahan Desa.....	17
3.1. Pengertian Pemerintahan Desa.....	17
3.2. Unsur-Unsur Pemerintahan Desa	20
3.3. Penyelenggara Pemerintahan Desa	22

4. Pembangunan	24
4.1. Pengertian Pembangunan	24
4.2. Pembangunan Berkelanjutan.....	26
4.3. Aspek-Aspek Pembangunan	27
5. Pengelolaan	28
5.1. Pengertian Pengelolaan	28
5.2. Fungsi Pengelolaan	29
5.3. Tujuan Pengelolaan	30
5.4. Pengelolaan Yang Baik	31
6. Pariwisata	32
6.1. Pengertian Pariwisata	32
6.2. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pariwisata	33
6.3. Strategi Pembangunan Pariwisata	34
7. Ekowisata	36
7.1. Pengertian Ekowisata	36
7.2. Prinsip-Prinsip Ekowisata	38
7.3. <i>Stakeholder Ekowisata</i>	39
7.4. Potensi Ekowisata	40
8. Masyarakat	40
8.1. Pengertian Masyarakat	40
8.2. Macam-Macam Masyarakat.....	41
8.3. Perbedaan Masyarakat Tradisional dengan Modern	42
9. Kesejahteraan	43
9.1. Pengertian Kesejahteraan	43
9.2. Kesejahteraan Sosial	44
9.3. Kesejahteraan Masyarakat.....	45
B. Penelitian Terdahulu.....	46
C. Kerangka Pikir	50
D. Konsep Operasional Variabel	51
E. Operasional Variabel.....	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Key Informan Dan Informan.....	55
1. Perencanaan Informan.....	55
2. Key Informan & Informan Tambahan	55
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisa Data.....	57
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	58

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Daerah Penelitian.....	59
1. Gambaran Umum Kabupaten Kampar	59

2. Sejarah Singkat Desa Batu Sanggan	60
B. Luas Wilayah dan Jarak Tempu Desa Batu Sanggan	61
C. Demografi Desa	61
1. Jumlah Penduduk Desa Batu Sanggan.....	62
2. Kualitas Ekonomi dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Batu Sanggan	62
D. Pemangku Adat.....	63
E. Potensi Atau Sumber Daya Yang Dimiliki.....	64
1. Keanekaragaman Nabati	64
2. Keanekaragaman Hewani	65
3. Sektor Ekowisata	65
F. Struktur Organisasi	66

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	67
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	67
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	68
B. Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.....	70
1. Prinsip Konservasi	70
1.1 Bentuk Kerjasama dan Peran Aktif Dari Sejumlah <i>Stakeholder</i> dan Masyarakat.....	70
1.2 Pemberdayaan Masyarakat	76
1.3 Seberapa Sering Kawasan Ekowisata Dijadikan Sebagai Objek Penelitian.....	77
2. Manajemen Operasional	79
2.1 Tujuan Dari Pengelolaan Ekowisata.....	79
2.2 Promosi yang Dilakukan Oleh Pengelola Kawasan Ekowisata.....	82
2.3 Sikap dan Partisipasi Penduduk Lokal Terhadap Keberadaan Ekowisata.....	86
C. Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	88
D. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	90

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Biaya Trasportasi Penyeberangan Ekowisata Batu Belah & Rumah Pohon.....	5
II.1 Tabel Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Usulan Penelitian Penulis	46
II.2 Tabel Operasional Variable Pengelolaan Ekowisata Batu Belah & Rumah Pohon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau	53
III.1 Jadwal Penelitian Pengelolaan Ekowisata Batu Belah & Rumah Pohon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.....	58
IV.1 Tabel Data Luas Wilayah Desa Batu Sanggan.....	61
IV.2 Tabel Data Kependudukan Desa Batu Sanggan.....	62
IV.3 Tabel Data Perekonomian dan Mata Pencaharian Penduduk Desa Batu Sanggan	62
IV.4 Tabel Data Potensi Sumber Daya Alam (Hayati)	64
IV.5 Tabel Data Potensi Sumber Daya Alam (Hewani).....	65
IV.6 Tabel Data Jumlah Kunjungan Ekowisata	65
V.1 Tabel Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
V.2 Tabel Identitas Responden Berdasarkan Usia	68
V.3 Tabel Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Tentang Pengelolaan Ekowisata Batu Belah & Rumah Pohon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.....	50
IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batu Sanggan.....	66



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferry Argandi
NPM : 147310104
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Atas naskah yang didaftarkan pada Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru,5 Agustus 2020

Pelaku Pernyataan

Ferry Argandi

**PENGELOLAAN EKOWISATA BATU BELAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BATU SANGGAN
KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI
RIAU**

ABSTRAK

FERRY ARGANDI

Kata Kunci: Pengelolaan, Ekowisata, Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan

Pengelolaan sumber daya alam melalui ekowisata yang merupakan bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi, bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi, dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami. Prinsip ekowisata sejatinya memiliki nilai ekonomis, dapat memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan. Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar adalah salah satu desa yang berdiri dikawasan ekowisata Rimbang Baling. Ekowisata memberikan peluang bagi desa untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan baru seperti tumbuhnya warung dadakan, jasa transportasi dan *camping ground*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan ekowisata yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa sekaligus untuk mengetahui factor pendukung dan factor penghambat dalam pengelolaannya. Indikator yang digunakan yaitu : Prinsip konservasi dan Management operasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan informan penelitian terdiri dari Bagian umum Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Staff analisis media dan pers Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Perwakilan Kelompok Kerja Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan, Pedagang disekitar ekowisata Batu Belah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pengelolaan yang dilakukan belum maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat belum tercapai dengan baik. Hal ini dikarenakan banyaknya hambatan yang ditemukan seperti akses, infrastruktur maupun kerjasama dari setiap stakeholder yang terkait.

THE MANAGEMENT OF BATU BELAH IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE IN DESA BATU SANGGAN, KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU, KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU

ABSTRACT

FERRY ARGANDI

Keywords: Management, Ecotourism, Community Welfare in Desa Batu Sanggan

Management of natural resources through ecotourism, which is a form of tourism that is very closely related to the principle of conservation, even in the ecotourism development strategy also uses a conservation strategy, thus ecotourism is very appropriate and effective in maintaining the integrity and authenticity of ecosystems in unspoiled areas. The principle of ecotourism actually has economic value, can provide benefits to the local community and become a driver of economic development in the region and ensure that ecotourism business can be sustainable. Desa Batu Sanggan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar is one of the villages that stands in the Rimbang Baling ecotourism area. Ecotourism provides opportunities for villages to develop new jobs, such as the growth of impromptu shops, transportation services and camping ground. This study aims to determine the management of ecotourism so that it can improve the welfare of the village community as well as to determine the supporting and inhibiting factors in its management. The indicators used are: Conservation principles and operational management. This research is a qualitative research with research informants consisting of the Bagian umum Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Staff analisis media dan pers Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Perwakilan Kelompok Kerja Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan, Pedagang disekitar wisata Batu Belah. The data collection techniques used were interview, observation and documentation. The results of the analysis concluded that the management has not been maximized so that the welfare of the community has not been achieved properly. This is due to the many obstacles found such as access, infrastructure and cooperation from each related stakeholder.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah memberikan kesempatan luas bagi daerah dalam mengembangkan potensi lokalnya juga memberikan dampak bagi pengelolaan desa. Desa merupakan cikal bakal berdirinya sebuah negara sehingga kehadirannya merupakan bagian penting dalam agenda pembangunan nasional. Hal tersebut bukan hanya didasarkan atas alasan fisik geografis, sumber daya alam atau sumber daya manusianya tetapi juga didalamnya menyimpan potensi-potensi ekonomi yang harus dikenali dan diperbaiki.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggungjawab yg lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah dan masyarakat didorong untuk mampu mengidentifikasi mengenai potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Tujuannya adalah agar mampu jadi penyokong ekonomi desa, meningkatkan pendapatan desa yang secara otomatis diharapkan akan meningkatkan pula tingkat hidup masyarakatnya. Pengelolaan potensi desa yang baik dengan peran serta

pemerintah desa maupun karakter masyarakat desa yang lebih partisipatif untuk membangun desanya.

Dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini berarti pemerintahan Indonesia harus memajukan pembangunan yang nasional bermula dari pembangunan yang merata dari pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa upaya mengembangkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pola pikir, sikap, perilaku, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui kegiatan program dan kebijakan sesuai dengan kenyataan dan keinginan masyarakat desa.

Desa memiliki peluang yang besar dalam memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk dapat memajukan desanya. Guna mencapai pengembangan desa perlu mempertimbangkan potensi desa dalam fisik dan non fisik. Oleh karena itu, memajukan desa melalui program-program pembangunan menjadi pembahasan menarik guna memberikan level kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Bukan hanya pemerintah melainkan masyarakat desa pun turut mengemban tanggung jawab dalam mengelola potensi dan sumber kekayaan alam desa tersebut.

Segala potensi kekayaan alam Indonesia banyak berasal dari desa. Hal ini menjadikan pembangunan di wilayah pedesaan menjadi peran penting dalam mendorong pembangunan nasional. Beragam kebijakan pembangunan untuk desa telah ditetapkan, mulai yang bersifat *top down* hingga *bottom up*.

Agenda pembangunan banyak menitik fokuskan pada pembangunan kesejahteraan di desa. Pembangunan tersebut tidak hanya pada pembangunan infrastruktur tetapi juga untuk memperbaiki kualitas sumber daya alam ataupun sumber daya manusia di desa.

Pengembangan dan pelestarian sumber daya alam melalui ekowisata yang merupakan bentuk wisata yang merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi, bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi, dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami, bahkan dengan ekowisata, pelestarian alam dapat ditingkatkan kualitasnya karena desakan dan tuntunan dari para *eco-traveler*.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan mengenai pengertian dari Ekowisata dimana ekowisata bertanggung jawab dengan memperhatikan berbagai unsur.

Secara sederhana, konsep ekowisata menghubungkan antara perjalanan wisata alam yang memiliki visi dan misi konservasi dan kecintaan lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena keuntungan finansial uang didapat dari biaya perjalanan wisata juga untuk kebutuhan konservasi alam serta perbaikan kesejahteraan penduduk lokal. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 ayat (c) yaitu prinsip ekowisata sejatinya memiliki nilai ekonomis, dapat memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.

Disisi lain, konsep ekowisata juga diarahkan untuk mempertahankan kebudayaan lokal serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan pergerakan demografi. Pergeseran konsep kepariwisatawan dunia ke model ekowisata, disebabkan karena kejenuhan wisatawan untuk mengunjungi objek wisata buatan. Oleh karena itu, peluang ini selayaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menarik wisatawan asing mengunjungi objek berbasis alam dan budaya penduduk lokal.

Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar adalah salah satu desa yang berdiri dikawasan ekowisata Rimbang Baling. Desa ini berada diwilayah lindungan cagar alam. Kawasan Rimbang Baling berada dibawah pengawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA). Instansi ini bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata. Selain itu BBKSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi diwilayahnya.

Ekowisata Batu Belah adalah kegiatan wisata alam di daerah Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Ini berarti bahwa ekowisata memberikan peluang bagi desa untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan baru seperti tumbuhnya warung dadakan, jasa pembuatan ole-ole ciri khas desa sekitar, jasa transportasi dan *camping ground*.

Tabel I.1 : Biaya Transportasi Penyebrangan Ekowisata Batu Belah.

No	Nama Alat Transportasi	Biaya	Jumlah Muatan (Orang)
1	Perahu Kecil (<i>Robin</i>)	Rp.250.000-Rp.500.000	1-4 Orang
2	Perahu Besar (<i>Jonson</i>)	Rp.500.000-Rp.1000.000	4-6 Orang

Sumber : Olahan Penulis 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk datang ke ekowisata Batu Belah tersebut harus menggunakan transportasi berupa perahu. Hal ini berarti bahwa untuk melihat ekowisata tersebut harus mengocek uang yang begitu besar agar bisa kesana. Bahkan untuk melalui jalur darat juga bisa, tetapi jalan yang begitu rusak dan terjal banyaknya tebing dipinggir jalan, mengakibatkan bahaya untuk dilalui.

Namun,peneliti masih menemukan terdapatnya gejala dan masalah yang ada didalamnya yaitu:

1. Belum maksimalnya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Pengelola Ekowisata Batu Belah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Akses untuk menuju ekowista Batu Belah dibagian darat bisa dibilang tidak layak untuk dilalui oleh kendaraan, karena masih banyaknya jalan yang rusak dan juga curam. Kondisi akses yang tidak memadai sangat menjadi penghalang bagi siapa saja yang ingin mengunjungi ekowisata Batu Belah. Dengan kondisi jalan yang rusak akan memakan waktu yang lebih lama untuk tiba dilokasi ekowisata. Ditambah dengan ketika hujan, maka akses untuk kelokasi ekowisata tersebut akan sangat sulit untuk dilalui karena sebagian besar jalan masih berbahan dasar tanah liat. Akan tetapi untuk kesana,

pengunjung masih bisa menggunakan jalur transportasi air yaitu dengan menggunakan perahu, tetapi membutuhkan biaya yang sangat banyak.

3. Belum tersedianya sarana dan prasana pendukung ekowisata Batu Belah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Ekowisata di kawasan Rimbang Baling (Batu Belah) adalah karena wisata Batu Belah memiliki potensi ekowisata yang besar, tetapi memiliki kendala yaitu dari segi kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Ekowisata masih belum maksimal, dari segi infrastruktur serta sarana/prasarana yang masih kurang. Selain itu lokasi wisata Batu Belah merupakan lokasi yang paling dekat dengan permukiman masyarakat, sehingga memiliki potensi untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat jika pengelolaannya dilakukan dengan baik dan benar atau dengan maksimal. Namun sayangnya pengelolaan yang dilakukan masih belum maksimal, sehingga potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Batu Sanggan masih sangat minim. Padahal Kawasan Ekowisata Batu Belah bisa menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat disana.

B. Rumusan Masalah

Dari pernyataan yang penulis paparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian penulis yaitu **“Bagaimana Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau?”**.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dalam Pengelolaan Ekowisata Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Pengelolaan Ekowisata Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

D. Manfaat Penelitian

- a. Dalam Akademis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan Pengelolaan Ekowisata Batu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- b. Dalam Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan Ekowisata Batu Belah, serta peran serta dari pemerintah, stakeholder, maupun masyarakat sekitar daerah ekowisata.
- c. Dalam Praktis dapat digunakan sebagai bahan masukan serta bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam Pengelolaan Ekowisata yang berada dikawasan Rimbang Baling.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis mengaitkan beberapa pendapat dan teori sesuai dengan judul penelitian. Teori – teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada pemerintahan.

1. Pemerintahan

1.1. Pengertian Pemerintahan

Menurut Syafie (2013:12) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam hubungan pusat daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah.

Ilmu pemerintahan ini didefinisikan oleh Ndraha (2003:7) sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan *civil* dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintah dari beberapa sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya “sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan”. Berdasarkan dari definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup pemerintahan yaitu terdiri dari :

1. Yang diperintah
2. Tuntutan yang diperintah (jasa publik dan layanan civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggungjawab pemerintah

5. Hubungan pemerintahan

Secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan yang menyeluruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan pe- menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran an- menjadi pemerintahan , yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Ndraha (dalam Awang dan Mendra Wijaya, 2012:7) juga menjelaskan bahwa pemerintah adalah alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk tujuan negara.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dan yang menjalankan pemerintahan. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000;13) antara lain : menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui kekerasan.

Dalam kesimpulannya Syafie (2013; 27) menyebutkan bahwa ilmu pemerintahan sebaga ilmu untuk mempelajari bagaimana menjalankan pemerintahan secara baik dan benar dalam arti hubungan penguasa dengan rakyatnya dapat berlaku kebenaran sepanjang rakyat harus ditertibkan, sedangkan pemerintah harus baik melayani sepanjang rakyatnya tidak dikandasi moral.

1.2. Fungsi Pemerintahan

Menurut Rasyid (dalam Maulidiah, 2015:2) ada fungsi hakiki yang dimiliki oleh pemerintah sebagai penjabaran dari tugas pokoknya. Ketiga fungsi tersebut adalah:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Melakukan pemberdayaan kepada segala potensi yang ada
3. Melaksanakan kegiatan pembangunan

Sementara menurut Widjaja (2005:44) fungsi dari pemerintahan itu adalah sebagai unsur luar dari fungsi Lembaga tertinggi dan Lembaga tinggi negara. Atau dengan kata lain fungsi Eksekutif yang dilakukan presiden. Sehingga unsur pemerintahan tersebut tidak lagi mencampuri fungsi legislative maupun fungsi yudikatif.

Menurut Ndraha (2011:75) fungsi pemerintahan ada 3 yaitu:

1. Pemerintah dalam pelayanan
2. Pemerintah dalam pemberdayaan
3. Pemerintah dalam pembangunan

Dalam hal ini, fungsi pemerintah dalam pembangunan bukanlah fungsi pokok dari pemerintah yang dinilai hakiki melainkan fungsi *ad-interim*, karena dalam pembangunan masyarakat masih belum mampu untuk membangun diri sendiri.

Kemudian dari pendapat Ndraha (2011: 85), menyatakan ada 2 fungsi dari pemerintahan yang dimaksud, yaitu :

1. fungsi Primer yakni fungsi pelayanan (services), memberikan pelayanan jasa public, dan pelayanan sipil termasuk dalam pelayanan birokrasi kepada masyarakat.
2. fungsi sekunder yakni fungsi pemberdayaan (empowernment), pemerintahan melakukan pembangunan dan program pemberdayaan untuk masyarakat.

1.3. Urusan Pemerintahan

Merupakan suatu kekuasaan dari pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden, pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Adapun yang termasuk dalam urusan Pemerintahan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dibedakan atas 2 jenis sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 9 yaitu :

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pemerintahan Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan absolut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pemerintahan Pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustitisi, fiscal atau moneter, dan agama.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten/kota. Urusan konkuren meliputi urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar. Serta ada 8 urusan pilihan. Adapun yang termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat dan social.

Dan yang termasuk dalam Urusan wajib non pelayanan dasar yaitu ; Tenaga Kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan,

Pertahanan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Koperasi usaha kecil dan menengah, Penanaman modal, Kepemudaan dan olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

Yang termasuk dalam 8 urusan pilihan meliputi : Kelautan dan perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing. Adapun yang termasuk dalam urusan tersebut yaitu ;

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam angka menetapkan pengamatan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan, dan pemeliharaan keutuhan NKRI.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, rasa dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan negara.
4. Penanganan konflik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Pemerintahan Sebagai Ilmu

Mempelajari ilmu pemerintahan bisa dilihat dari 2 sudut pandang yaitu :

1. Bagaimana seharusnya, menjadi normatif dan ideal apabila dapat diterima oleh seorang yang bersangkutan pada saat dibutuhkan.
2. Bagaimana senyatanya, menjadi empirik apabila orang yang bersangkutan menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak.

Ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafiie 2005:21) yaitu ilmu yang mempelajari susunan dan fungsi lembaga pemerintahan apakah sudah berjalan dengan baik kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007:32), ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Ilmu yang menguasai, memimpin dan menyelidiki bagian-bagian dinas yang hubungan dinas-dinas dengan masyarakat kepentingannya diwakili oleh Dinas.
2. Ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang terbaik dari berbagai dinas sebagai suatu kesepakatan yang menyelidiki susunan masalah. sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam maupun keluar.
3. Ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara pemerintahan dengan yang diperintah, yang diatur untuk menghindari timbulnya perselisihan.
4. Untuk mencapai efektif dan efisien dalam pemerintahan itu perlu keselarasan antara pihak satu dengan yang lainnya.
5. Ilmu yang menerapkan penyelidikan dinas-dinas dalam arti seluas-luasnya, baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga didapatkan langkah-langkah bekerja yang tepat sasaran untuk mencapai tujuan negara.

Ndrahaa (dalam Sadu, 2013) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan akan pelayanan jasa publik dan pelayanan sipil dalam hubungan pemerintahan, sehingga diterima baik oleh masyarakat.

2. Pemerintahan Daerah

2.1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 , yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 5).

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi yang luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam system NKRI.

2.2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada hakikatnya terdiri dari 3 asas: Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

1. Asas Desentralisasi, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang disebut dengan Desentralisasi ialah penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada daerah otonom dengan asas Otonomi Daerah.
2. Asas Dekonsentrasi, yaitu asas yang melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal yang ada di wilayah tertentu, dan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum yang ada di daerah.
3. Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari Pemerintahan Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Cheema dan Rondinelli (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 32) mendefinisikan desentralisasi sebagai “the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local government or non-government organizations.” Definisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Desentralisasi adalah tidak semata-mata sebuah pemindahan urusan atau administrasi, malah lebih luas, ia juga meliputi proses perencanaan, pembuatan keputusan dan pertanggungjawaban.

Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2013 : 83) mengatakan azas Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kemudian Smith (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 33) melihat bahwa Desentralisasi sebagai penurunan kewenangan dari kantor pusat di ibu kota negara kepada kantor di ibu kota provinsi. Sejalan dengan itu, Edmond mendefinisikan Desentralisasi sebagai proses dimana kewenangan pembuatan keputusan yang bersifat keuangan dan administrasi diserahkan kepada unit subnasional atau unit – unit pemerintah pusat.

Dari pendapat Cheema dan Rondinelli, Smith serta Edmond tersebut, Yusoff dan Yusran dalam bukunya (2007 : 33) merumuskan bahwa Desentralisasi adalah suatu pengalihan kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada unit – unit lokal dibawahnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga bukan pemerintah.

Ada beberapa bentuk desentralisasi itu. Hal ini seperti dikemukakan oleh Bird dan Wallich (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 34) yang membagikan Desentralisasi kepada tiga bentuk, yaitu dekonsentrasi, delegasi dan desentralisasi (devolusi). Sedangkan Litvac dan Seddon (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 34) membagikan Desentralisasi kedalam empat bentuk, yaitu *pertama* desentralisasi politik, *kedua* desentralisasi administrasi, (kemudian desentralisasi administrasi ini memiliki tiga bentuk dekonsentrasi, delegasi dan devolusi), *ketiga* desentralisasi fiskal dan *keempat* desentralisasi ekonomi atau pasar.

Sejalan dengan pembagian jenis Desentralisasi diatas, United Nations Development Programs (UNDP) dalam buku Yusoff dan Yusran (2007 : 35) juga membedakan jenis Desentralisasi kepada tiga bentuk yaitu, Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Keuangan (Fiskal).

Kemudian sebagai konsekuensi dari Desentralisasi tersebut maka diadakanlah Otonomi Daerah yang artinya daerah otonom diberikan hak dan wewenang serta Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku (Syafiie 2007 : 239).

Masih menurut Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007 : 230), Daerah otonom berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berKewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Pentingnya Desentralisasi

Smith (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 39) mengemukakan beberapa alasan mengapa Desentralisasi sangat diperlukan dan penting dalam organisasi publik, diantaranya ialah:

- a. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Sebagai arena pendidikan dan latihan kepemimpinan politik.
- c. Mencapai kesetaraan politik.
- d. Stabilitas politik.
- e. Akuntabilitas politik.
- f. Ketanggapan terhadap kebutuhan publik.

Selanjutnya menurut Moh. Ryaas Rasyid (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 40) Desentralisasi juga dipandang oleh banyak sarjana sebagai arena pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam sebuah Negara.

Desentralisasi memiliki aspek positif karena ia memungkinkan masyarakat tempat menjalankan latihan kepemimpinan sebelum menjadi salah satu aktor politik di tingkat nasional (Agus Yusoff dan Andi Yusran 2007 : 40)

3. Pemerintahan Desa

3.1. Pengertian Pemerintahan Desa

Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang artinya adalah tempat asal, dan tempat tinggal, negarai asal mereka yang beranjak pada sebuah kesatuan kehidupan manusia, dengan adanya nilai-nilai norma kehidupan, dan mempunyai batasan yang cukup jelas. Kemudian Soetardjo (dalam Rahyunir dan Maulidiah 2015 : 9) mengatakan sesuai dengan definisi tersebut, di negara Indonesia banyak ditemukan kesatuan masyarakat dengan sebutan nama daerahnya masing-masing beragam sebutan seperti Dusun dan Marga sebutan

bagi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, kemudian sebutan Dati untuk masyarakat daerah wilayah Maluku, selanjutnya Nagari sebutan untuk masyarakat Minang tau Wanua di wilayah Minahasa. Dan sebutan untuk daerah lain, juga memiliki sebutan tersendiri baik secara mata pencarian mereka maupun adat istiadatnya.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul kemudian diakui dan dihormati oleh Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pada ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Wasistiono dan Tahir (2006 : 1) menyatakan keberadaan desa “kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang lemah. Jika mengibaratkan system pemerintahan mulai dari Pemerintahan Pusat, Daerah, dan Desa maka Desa

merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan. Padahal desalah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama”.

Jika dilihat penjelasan di atas oleh Wasistiono dan Tahir terlihat bahwa keberadaan pemerintahan desa berada posisi akhir dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dalam hal ini pemerintah desa perlu diberikan perhatian dan bimbingan oleh pemerintahan di atasnya agar pemerinatah desa juga mempunyai arah dan kekuatan dalam mengelola otonomi desa serta menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Nurcholis dalam bukunya “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (2011 : 1) mengatakan bahwa Desa dan Kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat bedasarkan asal usulnya.

Pengertian lainnya tentang Desa dinyatakan oleh pemerhati tentang desa lainnya yakni Bouman dan Baratha, menurut pandangan Bouman dalam Baratha sebagaimana yang dikutip oleh Wasistiono dan Tahir (2006 : 8) yang menyebutkan “Desa adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak bebrapa ribu orang, hamper semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”

3.2. Unsur-Unsur Pemerintahan Desa

Bintarto memberikan pandangan (dalam Wasistiono dan Tahir 2006 : 9) ia memandang desa dari segi geografi mendefinisikan desa sebagai “suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain”. Menurut Bintarto, unsur – unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah :

1. Daerah, dalam arti tanah – tanah yang produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan – ikatan pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural sociaty*).

Ketiga unsur ini tidak terpisah melainkan ada keterikatan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Unsur daerah, penduduk dan tata kehidupan merupakan satu kesatuan hidup atau "*living unit*". Maju mundurnya desa tergantung pada tiga unsur ini yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor usaha manusia (*human effort*) dan tata geografis (*geographical setting*). Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada "*human effort*" untuk memanfaatkan daerahnya. Tiap – tiap daerah mempunyai "*geographical setting*" dan "*human effort*" yang berbeda-beda, sehingga tingkat kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama.

Sedangkan pengertian desa menurut Baratha (dalam Nurcholis 2011 : 4) "Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu "badan hukum" dan ada pula "badan pemerintahan", yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkungnya"

Selanjutnya Ter Haar (dalam Nurcholis 2011 : 16) juga memberikan pandangan lainnya tentang konsep desa yaitu desa adalah "satu kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tersebut juga dinyatakan sebagai kelompok-kelompok teratur yang bersifat memiliki yang memiliki benda-benda material maupun immaterial (*geordnede groepen van blijvend karakter met eigen bewind eneigen matericel vermogen*)".

Kemudian dalam Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan penegertian "Desa adalah desa dan desa adat atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan Sunardjo juga memberikan penjelasan tentang desa (dalam Wasistiono dan Tahir 2006 : 10) ia menjelaskan bahwa “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”. Selanjutnya, masih menurut Sunardjo, susunan desa – desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 (tiga) tipe yaitu :

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial/wilayah tempat bersama sebagai dasar utama;
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan kesamaan keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut;
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

3.3. Penyelenggara Pemerintahan Desa

Nurcholis dalam bukunya “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (2011 : 73) mengatakan penyelenggaraan pemerintahan desa

dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa;
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas :
 1. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 2. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain;
 3. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya, seperti kepala dusun.

Selanjutnya, lembaga Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (dalam Nurcholis 2011 : 77).

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. (dalam Nurcholis 2011 : 78).

4. Pembangunan

4.1. Pengertian Pembangunan

Pada hakekatnya pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Perkembangan atau pembangunan masyarakat sebagai proses perubahan menunjukkan beprosesnya masyarakat yang semakin dewasa dalam merespons sebagai persoalan yang juga semakin berkembang sejalan dengan proses perubahan itu sendiri. (Soetomo 2009 : 22)

Dalam pengertian ini terkandung makna kapasitas masyarakat yang semakin meningkat yang kemudian membawa dampak pada peningkatan taraf hidupnya. Peningkatan kapasitas di sini termasuk meningkatkan dorongan dari dalam diri masyarakat untuk berubah semakin baik, kapasitas untuk mengidentifikasi sumber daya, potensi dan peluang serta memanfaatkannya, dan kapasitas untuk merespon sebagai tantangan yang muncul.

Soetomo Dalam bukunya *Pembangunan Masyarakat* (2009 : 25) memberikan empat asumsi sebagai konsep dasar pembangunan masyarakat adalah *Pertama* Perkembangan atau pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan proses perubahan. *Kedua* Perkembangan atau pembangunan masyarakat adalah proses semakin terciptanya hubungan yang harmonis antara kebutuhan masyarakat dengan potensi, sumber daya dan peluang. *Ketiga* perkembangan atau pembangunan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk merespon sebagai persoalan yang berkembang. *Keempat*

perkembangan atau pembangunan masyarakat merupakan proses yang bersifat multidimesni.

Kemudian Menurut Effendi (2002:2) pembangunan adalah “suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”. Dalam hal ini tentu dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menjadi posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran masyarakat akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Menurut Rogers (dalam Agus Suryono 2001: 132) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Adapun pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti yang dimaksud berupa prasarana perhubungan wilayah pedesaan yaitu jalan, jembatan dan lain-lainnya, kemudian prasarana pemasaran yaitu gedung dan pasar, prasarana sosial yaitu seperti gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan puskesmas selanjutnya seperti prasarana produksi saluran air.

Dalam hal ini jelas bahwa pembangunan itu mengarah kepada proses perubahan yang lebih baik memberikan dampak sebuah keadilan, terwujudnya

sebuah pembangunan yang baik tidak terlepas dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya.

Lain hal dengan Mulianto (2018) menurutnya pembangunan itu mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (community/group).

Mulianto (2018) juga menambahkan Pembangunan desa sebaiknya dilakukan dalam rangkaimbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasaranaprasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Kemudian pendapat Woolcock dan Naraya (dalam Mulianto ; 2018), ada bebrapa aspek-aspek yang penting dalam pembangunan desa menuju kesejahteraan sosial antara lain:

1. Menguatkan lembaga desa dan masyarakat desa melalui pembangunan partisipatif.
2. Menganalisis modal sosial masyarakat desa melalui riset mendalam dengan berlandaskan indikator-indikator modal sosial
3. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menopang dan melakukan pembangunan dari perencanaan hingga pada pelaksanaan, pada semua sektor pembangunan baik fisik maupun sosial.
4. Membangun jaringan yang lebih luas sebagai bentuk pengembangan modal sosial masyarakat yang berdampak pada perluasan pencapaian kesejahteraan masyarakat desa

4.2. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama yaitu Ekonomi, Sosial dan lingkungan yang saling bergantung dan juga saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Pembangunan berkelanjutan erat kaitannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam.

Pembangunan berkelanjutan menurut Ordonez dan Dunker (2010) terbagi atas tiga yang dimaksud yaitu :

1. merupakan suatu kapasitas untuk menjaga stabilitas ekologi, social, rkonomi, transformasi jasa biosfir kepada masyarakat.
2. Juga untuk memenuhi sesuatu yang menjadi kebutuhan pada masa sekarang ini dan generasi selanjutnya.
3. dan untuk mewujudkan sistim yang dikehendaki dalam waktu yang tidak terbatas.

4.3.Aspek-aspek Pembangunan Berkelanjutan

World Summit on Sustainable Development Johannesburg, South Africa,
26 Agustus – 4 September 2002 menyimpulkan bahwa 6 aspek terkait dengan pembangunan berkelanjutan seperti :

1. Perubahan iklim.
2. Penanggulangan bencana.
3. Keragaman biologi.
4. Keragaman budaya.
5. Pengetahuan local.
6. dan Kesetaraan gender

Skema pembangunan berkelanjutan lebih dijabarkan secara mendalam dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menyebutkan bahwa keberagaman budaya itu penting bagi manusia, sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi saja, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

5. Pengelolaan

5.1. Pengertian Pengelolaan

Kamus besar bahasa Indonesia kata pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola: yang artinya mengurus suatu bidang usaha (perusahaan, pertanian, dan sesuatu yang mempunyai tujuan). Sedangkan arti dari pengelolaan itu sendiri adalah proses, cara perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Balderton (dalam Adisasmita. 2011;22) mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia yang memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Hamalik (dalam Adisasmita. 2011;22) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.

Moekijat (dalam Adisasmita. 2011;21) Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Manajemen dan pengelolaan adalah proses pengelolaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota anggota dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2008:8).

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, peorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

5.2. Fungsi Pengelolaan

Berdasarkan fungsi Pengelolaan (managemen) diatas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap dalam melakukan pengelolaan adalah Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Fungsi-fungsi pengelolaan (managemen) tersebut bersifat Universal.

Menurut Malayu Hasibuan (2004:40-41) manajemen atau pengelolaan terdapat beberapa fungsi yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendatkan bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian (Organizing) adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi seseorang penelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.

3. Pengarahan

Pengarahan adalah suatu langkah untuk memberikan penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun secara fungsional agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dalam rangka untuk mencapai tujuan.

4. Pengendalian

Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut delegasi diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Daar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sedangkan menurut George R. Terry (2006:16-19) fungsi manajemen yaitu:

1. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Penggerakkan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. Pengawasan (*Controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

5.3. Tujuan Pengelolaan

Tujuan Pengelolaan adalah agar seluruh sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, sumber daya alam, sarana dan prasarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan dengan maksimal, dan dapat mengurangi resiko pemborosan dari banyak aspek dalam organisasi tersebut. Setiap organisasi pasti memerlukan system pengelolaan yang baik. Karena tanpa adanya pengelolaan

atau manajemen yang baik maka semua usaha yang dilakukan tidak akan mampu mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Ada beberapa tujuan dari Pengelolaan yaitu :

1. Untuk pencapaian tujuan dari organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang memiliki kepentingan di dalam organisasi.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisiensi dan efektivitas.

5.4. Pengelolaan Yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan dasar bagi pengembangan setiap organisasi. Baik organisasi pemerintah, perusahaan, ataupun organisasi-organisasi lainnya. Hal tersebut dapat mengidentifikasi bahwa suatu organisasi yang dimaksud telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas sebuah institusi dalam membangun suatu kebijakan. Melalui suatu pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya.

Menurut George R. Terry (2006:342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha untuk menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan pemusatan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung

jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar dapat bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi yang dijalankan.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

6. Pariwisata

6.1. Pengertian Pariwisata

Menurut Yoeti (2006:118) pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu , yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan reaksi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

Dari pengertian pariwisata yang sudah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pariwisata merupakan perjalanan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu dengan maksud bukan untuk memperoleh materi, tetapi semata-mata untuk memperoleh pengetahuan atau sekedar bersenang-senang.

Untuk dapat mudah dalam memahami status kepariwisataan dalam pengembangannya sesuai dengan perubahan zaman yang selalu terjadi, maka perlu terlebih dahulu dipahami tentang pengertian dari kepariwisataan itu sendiri.

Kepariwisataan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 adalah: “ Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara

sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek daya tarik wisata. Unsur terpenting dalam kegiatan wisata adalah tidak bertujuan mencari nafkah, tetapi apabila disela-sela kegiatan mencari nafkah itu, ia juga secara khusus melakukan kegiatan wisata, bagian dari kegiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan wisata”.

Spillance (2001:3) juga mengatakan bahwa pariwisata adalah seluruh fenomena dari hubungan yang muncul antara wisatawan, pengusaha, pemerintah dan masyarakat daerah tujuan wisata dalam rangka menarik wisatawan untuk tinggal di tempat wisata.

Me Instosh dan Gupta sebagaimana diterjemahkan oleh Pandit (2004:30) menjelaskan bahwa, pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dan interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah dan masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan ini serta pengunjung lainnya.

Yang dimaksud dengan turis atau wisatawan adalah setiap orang yang memenuhi dua kondisi, yaitu:

1. Orang tersebut tidak sedang berada dikediamannya selama waktu tertentu yang relative singkat.
2. Uang yang dibelanjakan selama tidak berada dikediamannya adalah uang yang dibawa dari tempat kediamannya yang bukan uang yang diperoleh dari tempat tujuan yang dikunjunginya (Ogilvie dalam Marpaung 2002:20)

6.2. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pariwisata

Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Untuk dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan

pariwisata agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata menurut Damanik dan Weber (2006:21) yaitu:

1. Memberi penegasan dalam tata guna lahan untuk pengembangan Kawasan wisata. Seperti kepastian atas hak milik, sistim persewaan dan lainnya
2. Memberikan perlindungan lingkungan alam dan cagar budaya untuk mempertahankan daya Tarik objek wisata, seperti aturan pemanfaatan sumber daya
3. Menyediakan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan angkutan pariwisata
4. Fasilitas fiscal, pajak, dan izin usaha yang tidak menyulitkan agar mendorong masyarakat untuk melakukan wisata dan usaha-usaha pariwisata cepat berkembang
5. Menciptakan keamanan dan kenyamanan berwisata melalui penugasan polisi khusus pariwisata di Kawasan-kawasan wisata
6. Jaminan kesehatan di daerah tujuan wisata melalui sertifikat kualitas lingkungan dan mutu barang yang digunakan wisatawan
7. Penguatan kelembagaan pariwisata yaitu dengan memfasilitasi dan memperluas jaringan kelompok atau organisasi kepariwisataan
8. Pendampingan dalam promosi wisata
9. Regulasi persaingan usaha yang memungkinkan kesempatan yang sama bagi semua sector usaha pariwisata, melindungi UKM wisata, mencegah perang tarif dan lainnya
10. Pengembangan sumber daya manusia dengan menerapkan sertifikasi kompetensi kepariwisataan.

6.3. Strategi Pembangunan Pariwisata

Dalam usaha membangun dan mengembangkan objek wisata perlu di dukung oleh berbagai macam strategi yang dilakukan antara lain :

a. Perencanaan

Menurut Noer (2011) aspek perencanaan pengembangan objek wisata alam mencakup sistem perencanaan kawasan, penataan tata ruang standarisasi identifikasi, koordinasi lintas sektoral, pendanaan, dan sistem informasi objek wisata alam.

Salah satu fungsi manajemen yang paling utama adalah perencanaan karena dari fungsi tersebutlah fungsi-fungsi lain disusun, perencanaan merupakan

cetak biru untuk pencapaian tujuan yang memuat pengalokasian sumber daya yang memuat pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, jadwal, tugas-tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan terkait dengan pencapaian tersebut.

b. Sarana dan Prasarana

Suantoro (2007:22) mengatakan bahwa sarana dan prasarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.

Dengan adanya sarana kepariwisataan, diharapkan objek pariwisata yang ada di daerah dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi dan tinggal dalam jangka waktu tertentu, serta dapat menikmati pelayanan yang memuaskan dari pihak pengelola pariwisata.

a) Promosi Objek Wisata

Menurut Marpaung dan Bahar (2002:103) promosi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan produk pariwisata dengan permintaan pariwisata dengan permintaan wisatawan sehingga produk menjadi lebih menarik.

Menurut Bukhori Alma dalam Surya Dana (2015:13) promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang merupakan aktivitas pemasaran ialah menyebar informasi, mempengaruhi dan membujuk mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

Strategi promosi menurut Kotroler dan Amstrong (2001:74) adalah kreativitas mengkomunikasikan keunggulan produk serta membujuk pasar sasaran. Dalam sektor pariwisata strategi promosi ini penting dilakukan karena

sektor pariwisata merupakan industri yang kompetitif. Dalam industri pariwisata yang berkembang pesat, persaingan-persaingan menjadi semakin tinggi, sehingga strategi promosi destinasi wisata semakin penting peranannya (Candra dan Menezes, 2001).

b) **Kemampuan Sumber Daya Manusia**

Nawawi (2003:40) mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset yang berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) didalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi yang nyata, secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

c) **Kerjasama**

Kerjasama pada hakikatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama.

7. Ekowisata

7.1. Pengertian Ekowisata

Secara umum, ekowisata merupakan perjalanan seseorang atau kelompok ke tempat-tempat yang berbasis alam yang bertujuan untuk mengkonservasi lingkungan serta memberi penghidupan bagi masyarakat sekitar.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, pada pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur Pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat local.

Menurut *The International Ecotourism Society* atau Masyarakat Ekowisata Internasional (2015) Ekowisata juga disebut sebagai bentuk perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah-daerah alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat setempat, melibatkan interpretasi serta mendirikan Pendidikan lingkungan hidup.

Ekowisata adalah suatu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan aktivitas melihat, menyaksikan mempelajari, mengagumi alam, flora dan fauna, sosial-budaya etnis setempat dan wisatawan yang melakukannya ikut membina kelestarian lingkungan alam sekitarnya dengan melibatkan penduduk lokal (Yoeti, 2000).

Masyarakat Ekoturisme Internasional (IES) memberikan definisi ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah alami yang lingkungannya dilindungi dan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal (Sunaryo: 2001). Ada empat gambaran perjalanan yang umumnya berlabelkan ekowisata yaitu:

1. wisata berbasis alamiah (nature-based tourism),
2. kawasan konservasi sebagai pendukung objek wisata (conservation supporting tourism)
3. wisata yang sangat peduli (environmentally aware tourism), dan
4. wisata yang berkelanjutan (sustainable tourism).

Secara konseptual ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.

Dari segi pengelolaannya, ekowisata dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ditempat-tempat alami atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan secara ekonomi berkelanjutan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, menjaga kearifan local, nilai budaya, adat istiadat dan kebiasaan leluhur yang akan terjaga tanpa adanya perubahan yang terjadi. Sekaligus memberikan Pendidikan terhadap pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga kelestarian wisata alam dari setiap daerah yang berbeda-beda.

7.2. Prinsip-prinsip Ekowisata

Prinsip-prinsip ekowisata adalah serangkaian prinsip yang dapat mengatur dalam menyatukan konservasi lingkungan hidup, pengembangan masyarakat dan wisata berkelanjutan. Dimana prinsip yang dimaksud yaitu:

1. Meminimalkan dampak fisik, social, perilaku, psikologis.
2. Membangun kesadaran lingkungan budaya serta rasa hormat.
3. Memberikan pengalaman yang positif bagi pengunjung dan tuan rumah.
4. Memberikan kemudahan sekaligus manfaat keuangan langsung bagi kegiatan konservasi.
5. Menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat local.
6. Membangun dan mengoperasikan fasilitas atau infrastruktur dengan meminimalkan dampak lingkungan.

7. Memberikan pengalaman interpretative yang mengesankan bagi pengunjung untuk meningkatkan sensitivitas terhadap iklim politik, lingkungan, social tempat tujuan wisata.
8. Mengakui hak-hak, keyakinan spiritual komunitas adat dan memberdayakan mereka.

7.3. Stakeholder Ekowisata

Pengelolaan Ekowisata tentu saja melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan berbagai peran yang mereka miliki. Berbagai kelompok dalam organisasi tersebut ikut serta dalam mendukung pengelolaan ekowisata. Enam kelompok *Stakeholder* utama yang dapat mempengaruhi pola pengembangan dan kebijakan pariwisata dalam Kawasan dengan keanekaragaman hayati yang signifikan secara global (Dwyer dan Edwards, 2000) adalah sebagai berikut :

1. Sector public (badan pemerintahan local, nasional, regionaleal, dan global).
2. Sector privat.
3. Lembaga donor bilateral dan multilateral.
4. Lembaga swadaya masyarakat (LSM).
5. Komunitas local dan penduduk terasing.
6. Konsumen.

Sementara menurut Damanik (2006) mendefinisikan *stakeholder* ekowisata sebagai berikut :

1. Sector industry.
2. Sector public.
3. Organisasi non pemerintah.
4. Lembaga-lembaga donor international.
5. Lembaga-lembaga penelitian.
6. Wiraswasta.
7. Masyarakat setempat.

7.4. Potensi Ekowisata

Ekowisata saat ini telah menjadi salah satu pilihan untuk mempromosikan lingkungan yang khas dan tetap menjaga kelestariannya, sekaligus menjadi suatu Kawasan kunjungan wisata sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Potensi ekowisata merupakan semua obyek (alam, budaya, atau buatan) yang memerlukan banyak penanganan agar dapat memberikan nilai daya Tarik dari wisatawan (Damanik dan Weber, 2006).

Potensi ekowisata sangat erat kaitannya dengan penawaran wisata, Potensi ekowisata adalah suatu modal atau aset baik berupa potensi budaya dan alamnya yang dimiliki oleh suatu daerah , yang dapat untuk dikembangkan dalam bentuk kegiatan wisata yang bertanggungjawab penuh dalam aspek lingkungan, memberikan kontribusi yang positif terhadap konservasi lingkungan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

8. Masyarakat

8.1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam istilah Bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari Bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang bergaul, dan saling berinteraksi.

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi berdasarkan suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki 4 ciri (Koentjaraningrat, 2009: 115-118) yaitu:

1. Interaksi antar warga-warganya.
2. Adat istiadat.
3. Kontinuitas waktu.
4. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup Bersama. Hidup Bersama diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini dapat tercipta apabila manusia melakukan hubungan. Mac Iver dan Page (dalam Soejono Soekanto, 2006:22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu system dari kebiasaan, tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Masyarakat merupakan bentuk kehidupan Bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soejono Soekanto, 2006: 22).

8.2. Macam-macam Masyarakat

Masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta memiliki beberapa kesamaan seperti, sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Adapun macam-macam masyarakat ialah:

1. Masyarakat Tradisional

Yaitu masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan adat istiadat yang telah ada sejak zaman dahulu secara turun temurun. Keterikatan tersebut menjadi masyarakat mudah curiga terhadap hal-hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat

tradisional merupakan masyarakat yang melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada patokan kebiasaan adat istiadat yang ada dalam lingkungannya. Kehidupan mereka belum tentu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya, sehingga kehidupan masyarakat tradisional cenderung statis.

2. Masyarakat Modern

Yaitu masyarakat yang sudah tidak lagi terikat pada adat istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru. Berdasarkan pandangan hukum, Amiruddin (2010: 205) menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern mempunyai solidaritas social organis. Solidaritas organis didasarkan atas spesialisasi. Solidaritas muncul karena rasa saling ketergantungan secara fungsional antara yang satu dengan yang lain dalam satu kelompok masyarakat. Spesialisasi dan perbedaan fungsional yang seperti diungkapkan tersebut memang kerap dijumpai pada masyarakat modern.

8.3. Perbedaan Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Modern

Hal yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Factor ketergantungan masyarakat tradisional dengan alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam. Oleh karena itu masyarakat tradisional

memiliki karakteristik tertentu yang menjadi ciri pembeda dengan masyarakat modern. Adapun karakteristik pada masyarakat tradisional adalah:

1. Orientasi terhadap nilai kepercayaan kebiasaan dan hukum alam yang tercermin dalam pola pikirnya.
2. Kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada agraris.
3. Fasilitas Pendidikan dan tingkat Pendidikan rendah.
4. Cenderung tergolong dalam masyarakat agraris dan kehidupan tergantung pada keadaan alam sekitar.
5. Ikatan kekeluargaan dan solidaritas masih kuat.
6. Pola hubungan social berdasarkan kekeluargaan, akrab dan saling mengenal.
7. Kepadatan penduduk rata-rata perkilometer masih kecil.
8. Pemimpin cenderung ditentukan oleh kualitas pribadi individu dan factor keturunan.

Berbeda dengan karakteristik yang diungkapkan oleh Dannerius Sinaga, Selo Soemardjan (1993: 62-68) mencirikan masyarakat tradisional berdasarkan pandangan sosiologis. Berikut karakteristiknya:

1. Masyarakat yang cenderung homogen.
2. Adanya rasa kekeluargaan, kesetiakawanan dan rasa percaya yang kuat antar para warga.
3. System social yang masih diwarnai dengan kesadaran kepentingan kolektif.
4. Pranata adat yang efektif untuk menghidupkan disiplin social.
5. *Shame Culture* (Budaya malu) sebagai pengawas social langsung dari lingkungan social manusia, rasa malu mengganggu jiwa jika ada orang lain yang mengetahui penyimpangan system nilai dalam adat-istiadat.

9. Kesejahteraan

9.1. Pengertian Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti yaitu :

1. Dalam kondisi umum, sejahtera menunjukkan kedalam kondisi manusia yang baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai.

2. Dalam tinjauan ekonomi sejahtera selalu dihubungkan dengan keuntungan atau manfaat keberadaan (ukuran materi) sebagai fungsi kesejahteraan sosial (secara formatif dan substantive bisa bermakna ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi).
3. Dalam tinjauan kebijakan social, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini merupakan istilah yang digunakan dalam ide negara kesejahteraan (*welfare state*).
4. Dalam tinjauan lain (seperti fenomena kebijakan di negara maju seperti Amerika), sejahtera merujuk kepada aspek keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan financial, tetapi tidak dapat bekerja atau yang pendapatannya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau jumlah yang dibayarkan tidak sepadan dengan upah yang seharusnya mereka terima.

9.1 Kesejahteraan Sosial

Menurut Friedlander (dalam Fahrudin, 2012:9) yang dikatakan dengan kesejahteraan social adalah suatu system yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan yang dirancang untuk membantu individual atau kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang baik ataupun yang selaras dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Kesejahteraan social menurut Huraerah (2003:153) ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang memiliki sejumlah permasalahan.

Kesejahteraan social sejatinya tergolong dalam 3 bagian yaitu kesejahteraan social sebagai suatu keadaan, kesejahteraan social sebagai suatu kegiatan atau pelayan, dan kesejahteraan social sebagai ilmu. Edi Suharto (2006:3) menjelaskan bahwa kesejahteraan social termasuk dalam suatu proses yang terencana yang juga dilakukan oleh kelompok tertentu ataupun perorangan.

Menurut Suparlan dalam Suud (2006:5) kesejahteraan social dapat menandakan suatu keadaan yang sejahtera dimana keadaan tersebut diantaranya jasmaniah, rohaniah, dan social.

9.2. Kesejahteraan Masyarakat

Konsep Kesejahteraan Masyarakat muncul sebagai indikator untuk mengukur hasil-hasil pembangunan ketika indikator yang selama ini bisa digunakan yaitu pendapatan nasional atau *Gross National Product (GNP)* dianggap kurang memuaskan. Ditahun 1953 PBB membentuk tim panitia ahli untuk membahas masalah pengukuran tingkat kehidupan rakyat, yang kemudian dikenal dengan konsep kualitas kehidupan rakyat (*the quality of life*) (Esmara dalam Soesastro dkk, 2005: 183-200). Walaupun ukuran kualitas kehidupan rakyat ini bersifat Universal, tetapi berbagai negara mencoba menyesuaikannya dengan kondisi dan situasi negaranya masing-masing.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat didefinisikan dengan menggunakan istilah kesejahteraan social. Sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Atau dengan kata lain masyarakat

dikatakan sejahtera ketika kebutuhan mereka terpenuhi sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Fungsi social dalam masyarakat merupakan cara-cara bertingkah laku atau melakukan tugas-tugas kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup individu, orang perorangan maupun sebagai keluarga, kolektif, masyarakat dan lain sebagainya.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis membuat penelitian mengenai Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian berkenaan dengan judul serupa. Namun dari setiap penelitian yang telah dilakukan, melahirkan berbagai perbedaan hasil. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis menjadikannya sebagai bahan tambahan dan referensi penulis. Namun demikian, penulis tetap membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana dapat dijabarkan

Tabel II.1 : Tabel Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Judul Usulan Penelitian Penulis.

NO	JURNAL	KAJIAN YANG DITELITI	ASPEK YANG MEMBEDAKAN
1.	“Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY”. Vol. 4. No. 3, Desember 2014: 271-286.	<ul style="list-style-type: none"> Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana model kegiatan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan mencari gambaran nilai-nilai social budaya serta kearifan 	<ul style="list-style-type: none"> Peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana pengelolaan Ekowisata Batu Belah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Lokasi penelitian

		<p>lingkungan yang dapat mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Yogyakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian di 3 desa yaitu Desa Wisata Sambi, Desa Wisata Kebon Agung dan Desa Wisata Brayut • Hasil yang diperoleh yaitu masyarakat masing-masing desa setempat tidak terlalu berorientasi pada pemanfaatan Desa Wisata sebagai Profit, tetapi lebih kepada hasrat untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang mereka miliki sehingga dapat mempererat kehidupan mereka sebagai penduduk local Desa Wisata.. 	<p>focus hanya di satu Desa yaitu Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.</p>
2.	<p>“Strategi Capacity Building Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi <i>Capacity Building</i> Pemerintah Desa dalam rangka mencapai pengembangan Kampung Ekowisata berbasis masyarakat local dan juga untuk menganalisis dampak pengembangan Ekowisata terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan pada pengelolaan Ekowisata Batu Belah, yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar Kawasan Ekowisata. • Lokasi penelitian terfokus hanya pada satu desa yang letaknya dekat

		<p>masyarakat local.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dilakukan di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. • Focus penelitian lebih kepada Strategi yang dilakukan Pemerintahan Desa Bendosari. • Hasil yang diperoleh yaitu strategi yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Bendosari dalam pengembangan ekowisata dapat meningkatkan kualitas SDM dan perekonomian Desa yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat desa, mambainya infrastruktur desa, dan meluasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 	<p>dengan Kawasan Ekowisata Rimbang Baling yaitu Desa Batu Sanggan.</p>
3.	<p>“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Ekowisata Sungai Pinang Studi Kasus : Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan ekowisata. • Hasil yang diperoleh yaitu pembangunan ekowisata yang ada di Sungai Pinang merupakan hasil perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri yang dipelopori 	<ul style="list-style-type: none"> • Sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pengelolaan ekowisata.

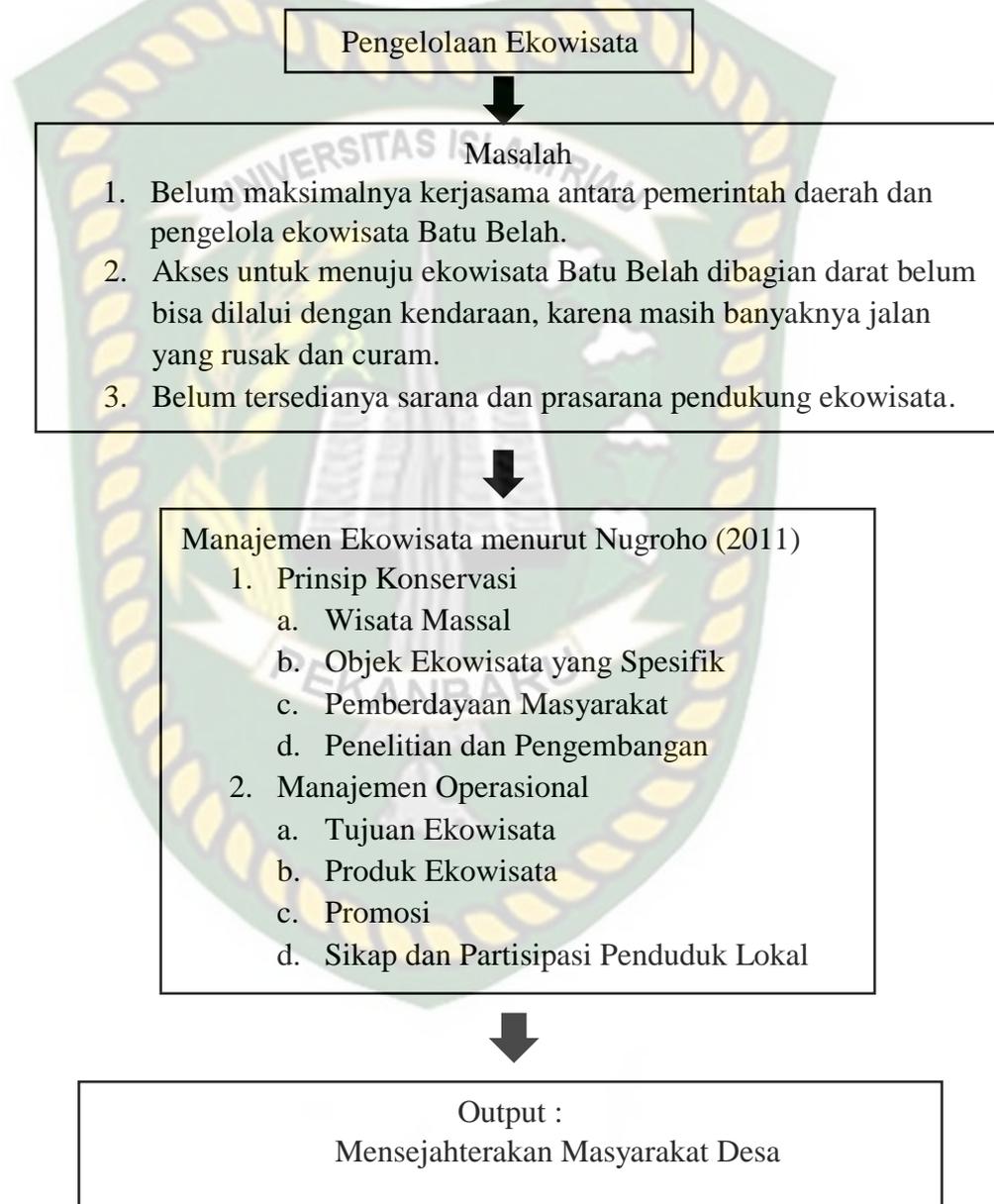
	Vol. 4. No. 2 Tahun 2017.	oleh kaum muda yang ada disana. Bentuk partisipasi tersebut yaitu: perencanaan , pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan.	
--	------------------------------	--	--

Sumber: Olahan Penulis 2020



C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau



Sumber : Olahan Penulisan Tahun 2020

D. Konsep Operasional

Adalah konsep yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan konsep yang akan penulis gunakan dan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penggunaan konsep-konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini maka penulis memperjelas tentang konsep yang akan dioperasionalkan di lapangan sebagaimana yang penulis maksudkan. untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Ekowisata adalah pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam peneliian ini yang dimaksud dengan ekowisata yang berada dalam Kawasan Rimbang Baling yakni Ekowisata Batu Belah.

5. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.
6. Perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasinya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.
7. Peorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi.
8. Penggerakan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.
9. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
10. Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki sebuah kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing memberdayakan potensi secara kondusif

bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisatawan serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

11. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam.

E. Operasional Variable

Tabel II.2: Konsep Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Menurut Nugroho (2011) Ekowisata memerlukan suatu sentuhan manajemen spesifik supaya dapat tercapai tujuan <i>sustainability</i> dalam aspek ekonomi, social budaya, serta lingkungan.	Pengelolaan Ekowisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1. Prinsip Konservasi 2. Managemen operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dan peran aktif dari para <i>stakeholder</i> dan masyarakat sekitar • Pemberdayaan masyarakat • Seberapa sering Kawasan ekowisata dijadikan sebagai objek penelitian. • Tercapainya tujuan pengelolaan Ekowisata Batu Belah • Promosi yang dilakukan oleh pengelola Kawasan ekowisata agar dapat menarik minat pendatang luar • Sikap dan partisipasi dari penduduk local terhadap keberadaan ekowisata.

Sumber : Modifikasi Penulis 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Guba mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Suharsaputra, 2014;181). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih di karenakan:

1. Ekowisata Batu Belah mempunyai potensi perekonomian bagi Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
2. Masih kurangnya minat pengunjung untuk melihat Ekowisata Batu Belah di Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

C. Key Informan dan Informan

1. Informan

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian yaitu semua elemen yang dapat memberikan informasi-informasi lainnya terkait dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Adapun informan tersebut yaitu :

- a. Bagian umum Dinas Pariwisata Provinsi Riau
- b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
- c. Staff analisis media dan pers Dinas Pariwisata Provinsi Riau
- d. Perwakilan Kelompok Kerja Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan
- e. Pedagang disekitar Ekowisata Batu Belah

2. Key Informan

Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Hendarso dan Suryanto, 2005;171-172). Adapun Key Informan dalam penelitian ini adalah Kelompok Kerja Ekowisata Batu Belah sebagai informan kunci.

D. Sumber Data

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara maupun pengamatan langsung terhadap lokasi ekowisata dan kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui peninggalan tertulis yang dilakukan dengan cara;

1. Membaca buku-buku literatur,
2. Dokumen, dan
3. Tulisan yang dianggap peneliti berkenan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara; Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Observasi; Mengamati secara langsung tanpa mediator atau sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.
3. Dokumentasi; Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca literatur, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti berkenan dengan penelitian yang sedang diteliti

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya dianalisis secara kualitas dengan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah

itu dari hasil analisis ditarik kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian yang berjudul Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

No	Jenis Kegiatan	Bulan, minggu dan Tahun Ke																			
		Desember 2019				Jan-Feb 2020				Maret-April 2020				Juni-Juli 2020				Agustus 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP Dan Bimbingan	■	■																		
2	Seminar UP					■	■														
3	Revisi UP							■													
4	Revisi Kuisisioner																				
5	Survay Lapangan													■	■						
6	Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																	■	■		
8	Konsultasi Revisi Skripsi																	■	■		
9	Ujian Konferehensif Skripsi																			■	■
10	Revisi dan Pengesahan Skripsi																			■	■
11	Penggadaan dan Penyerahan Skripsi																				■

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Daerah Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang terbentuk sejak 06 februari 1950. Secara administratif pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo kotonya, dimana daerah ini, dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat. Semasa pemerintahan sistem adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44”. Yang termasuk kedalam wilayah pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Air tiris dan Rumbio), X Koto di Tapung (Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.

Adat istiadat hingga bahasa sehari-hari yaitu bahasa “*Ocu*” hampir mirip dengan Minangkabau dan demikian pula semacam seni budaya, alat musik tradisional (calempung dan Oguong) dan beberapa kebiasaan lainnya. Luas Kabupaten Kampar sekitar 27.908.32 Km², dan beberapa kali pemekaran wilayah. Jumlah penduduknya berkisar 851.537 jiwa.

Secara astronomisnya Kabupaten Kampar terletak antara 01⁰⁰’40” Lintang Utara, 00²⁷’00” Lintang selatan dan antara 100²⁸’30”-101¹⁴’30”

Bujur Timur serta dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan letak geografinya, Kabupaten Kampar berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Siak
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

(Sumber: BPS Kabupaten Kampar 2019)

Kabupaten Kampar memiliki Kecamatan berjumlah 21 yaitu:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kecamatan Bangkinang Barat | 10. Kecamatan Kampar Utara |
| 2. Kecamatan Bangkinang Seberang | 11. Kecamatan Kampar |
| 3. Kecamatan Bangkinang | 12. Kecamatan Koto Kampar Hulu |
| 4. Kecamatan Gunung Sahilan | 13. Kecamatan Perhentian Raja |
| 5. Kecamatan Kampar Kiri Hilir | 14. Kecamatan Rumbio Jaya |
| 6. Kecamatan Kampar Kiri Hulu | 15. Kecamatan Salo |
| 7. Kecamatan Kampar Kiri Tengah | 16. Kecamatan Siak Hulu |
| 8. Kecamatan Kampar Kiri | 17. Kecamatan Tambang |
| 9. Kecamatan Kampar Timur | 18. Kecamatan Tapung Hilir |
| | 19. Kecamatan Tapung Hulu |
| | 20. Kecamatan Tapung |
| | 21. Kecamatan XIII Koto Kampar |

2. Sejarah Singkat Desa Batu Sanggan

Kenegarian Batu Sanggan diambil dari kata “Sanggan” yang berarti sebuah Periuk Besar, sebutan tersebut digunakan sejak zaman dulu, mula

kisahnyanya dulu masyarakat menenggalamkan periuk di dasar muara sungai yang bernama Sanggan. Pada masa itu masyarakat Batu Sanggan sedang tinggal/bermukim di sekitar muara sungai Batu Sanggan. Saat ini Kenegerian Batu Sanggan telah berpindah tempat ke seberang sungai yang berada lebih kehilir, perpindahan ini bertujuan mencari tempat tinggal yang lebih aman, karena masyarakat Batu Sanggan takut dengan ikan di muara sungai Batu Sanggan, masa itu ikan berukuran sangat besar dalam jumlah yang banyak selalu menakut-nakuti penduduk yang sedang berada di sungai, dan bahkan di kejar oleh ikan-ikan besar.

B. Luas Wilayah Dan Jarak Tempuh Desa Batu Sanggan

Tabel IV. 1 : Data Luas Wilayah Desa Batu Sanggan

NO.	JENIS WILAYAH	LUAS (hektar)
1.	Pemukiman	20 ha
2.	Lading	38 ha
3.	Perkantoran	3 ha
4.	Sekolah	1,75 ha
5.	Jalan	3 ha
6.	Lapangan Sepak Bola	2 ha

Sumber : Data Desa Batu Sanggan 2018

C. Demografi Desa

1. Jumlah Penduduk Desa Batu Sanggan

Tabel IV. 2 : Data Kependudukan Desa Batu Sanggan

No	Dusun	RW	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	1	4	37	62	57	119
2.	2	4	21	57	51	108
3.	3	4	35	72	69	141
4.	4	4	19	41	38	79
5.	Jumlah	16	122	232	215	447

Sumber : Data Desa Batu Sanggan 2018

2. Kualitas Ekonomi dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Batu Sanggan

Tabel IV. 3 : Data Perekonomian dan Mata Pencaharian Masyarakat

Pekerjaan	Jenis	Jumlah
1	2	3
Pertanian	Ladang	9 ha
	Jagung	1 ha
	Kakao/coklat	2 ha
	Sawit	1 ha
	Karet	2500 ha
	Kelapa	3 ha
	Singkong	4 ha
Peternakan	Kambing	32 ekor
	Kerbau	36 ekor
	Ayam	500 ekor
	Itik	20 ekor
Perikanan	Burung	50 ekor
	tambak	1 tambak

Sumber : Data Desa Batu Sanggan 2018

D. Pemangku Adat

Tugas dan Fungsi Pemangku Adat

Ninik Mamak: Pemimpin masing-masing suku di dalam kenegerian atau pimpinan adat (orang yang di tuakan di kampung). Ninik Mamak didalam struktur adat berada di bawah seorang khalifah. Perangkat ninik mamak terdiri dari Hulubalang dan Malin.

Datuk Godang Kanegeri: berfungsi memegang sepit dan gunting dalam negeri/memegang kebijakan dalam negeri. Pemimpin tiap kenegerian secara umum disebut dengan datuk godang kenegerian didalam negeri sebagai pemimpin tertinggi didalam kenegerian.

Dubalang : adalah orang yang dipilih dalam membantu tugas-tugas Ninik Mamak. Berfungsi kaki tangan Ninik Mamak dengan istilah cepat kaki ringan tangan/Pekerja. Dubalang terdapat di tiap-tiap suku.

Mamak Kampung, Ninik Mamak adalah orang yang didulukan selangkah dituakan sehari. Didalam setiap acara-acara adat yang akan diadakan di dalam komunitas akan dipimpin oleh Ninik Mamak.

Tunganai berperan dalam nikah kawin untuk memberitahukan ke suku-suku yang lain. Tunganai terbagi Tunganai Rumah dan Tunganai Kampung, Tunganai Rumah adalah sanak kemanakan atau beradik kakak di dalam rumah.

Mekanisme Pengambilan keputusan adalah Musyawarah Mufakat.

Hukum Adat

Aturan Adat yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam

Wilayah Adat

adalah milik Persukuan, dapat dikelola oleh masyarakat namun tidak boleh diperjual belikan.

Aturan Adat terkait Pranata Sosial

Tidak diperbolehkan Kawin satu suku. Jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai yang sudah diatur dalam aturan hukum adat yang sudah ditetapkan.

Contoh Keputusan dari penerapan Hukum Adat

Jika melanggar hukum adat yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi berupa orang tersebut akan diusir dari kampung, disangsi satu ekor kerbau, satu hidup satu mati.

E. Potensi atau Sumber Alam Yang dimiliki

1. Keanekaragaman Nabati

Tabel IV. 4 : Data Potensi Sumber Daya Alam (Nabati)

No	Manfaat SDA	Contoh
1	Sebagai Sumber Pangan	Padi, jagung, umbi-umbian
2	Sebagai Sumber Kesehatan dan Kecantikan	Daun mpik lading, daun capo, sirih, daun galinggang
3	Sebagai Sumber Sandang	Rumbia, rotan, daun kuang, daun umbai, Danar
4	Sebagai Sumber Rempah	Daun salam, lengkuas, kunyit, asam kandis

Sumber : Olahan Penulis 2020

2. Keanekaragaman Hewani

Tabel IV. 5 : Data Potensi Sumber Daya Alam (Hewani)

No	Jenis	Contoh
1	Hewan ternak darat dan budidaya perairan	Kerbau, kambing, unggas, ikan lele, ikan patin, dan sebagainya
2	Hewan liar/ tanpa budidaya dan peternakan	Ular, babi hutan, tringgiling dan sebagainya

Sumber : Olahan Penulis 2020

3. Sektor Ekowisata

Adapun potensi ini mampu menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata alam, hal ini dapat dibuktikan dengan data dibawah ini:

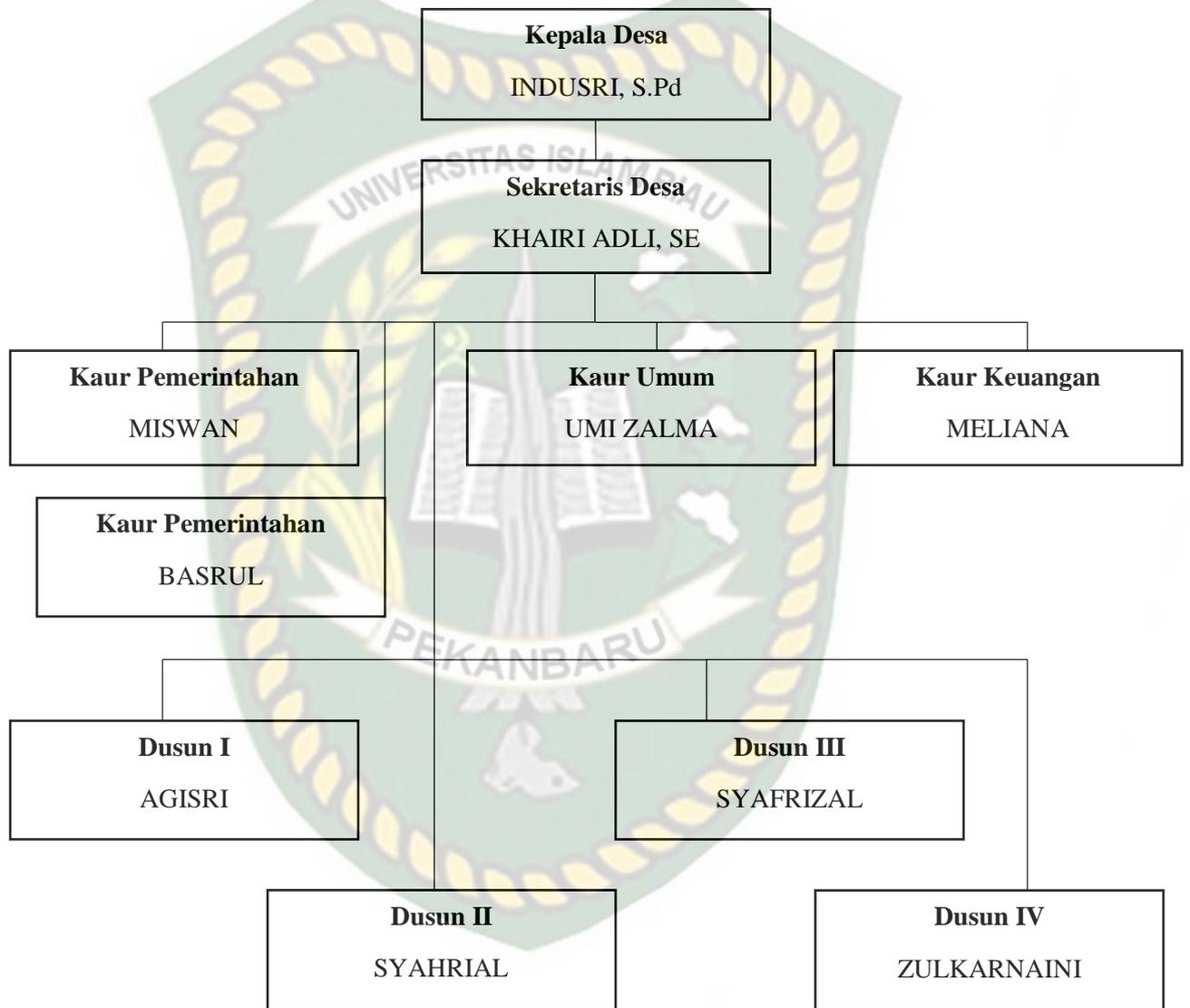
Tabel IV. 6 : Data Jumlah Kunjungan Ekowisata

No	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	2019	137
2	2018	179
3	2017	231

Sumber : Data Pokja Desa Batu Sanggan 2017-2019

**F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batu Sanggan Kecamatan
Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**

Gambar IV. 1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Sumber : Pokja Desa Batu Sanggan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Bagian umum Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Kampar, Perwakilan PokJa Ekowisata Batu Belah dan pedagang di sekitaran Ekowisata.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi identitas responden dalam penelitian ini, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	3	60 %
2.	Perempuan	2	40 %
Jumlah		5	100 %

Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan 2020

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara penulis di lapangan dengan sejumlah informan-informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka diperoleh identitas responden berdasarkan usia yang kemudian penulis jelaskan dalam penjabaran berbentuk table sebagaimana berikut :

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia

NO.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	25-30	1	20 %
2.	31-36	1	20 %
3.	37-42	2	40 %
4.	43-48	1	20 %
Jumlah		5	100 %

Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan 2020

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil penelitian dilapangan, penulis juga memperoleh identitas responden berdasarkan tingkat Pendidikan sebagaimana dapat dijabarkan dalam table berikut ini ;

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SLTA/ sederajat	1	20 %
2.	Strata 1 (S1)	3	60 %
3.	Strata 2 (S2)	1	20 %
Jumlah		5	100 %

Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan 2020

B. Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Ekowisata Batu Belah merupakan salah satu pilihan ekowisata yang berada dalam Kawasan Rimbang Baling. Kawasan Rimbang Baling merupakan Kawasan wisata alam yang berada di Daerah Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Dalam Kawasan Rimbang baling ada banyak objek wisata yang termasuk dalam kawasan lindungan dan konservasi. Hal yang dimaksud berupa tanaman-tanaman lindung, satwa dan ekosistem lainnya. Pengasawan dan pemeliharaan dalam Rimbang Baling sangat diperhatikan oleh pemerintah dikarenakan Kawasan ini masih sangat asri dan belum tersentuh oleh industry, ataupun factor eksternal lainnya yang berpotensi akan merusak keasrian alam tersebut.

Kawasan ekowisata ini memiliki potensi perekonomian yang jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik akan memberi penambahan pendapatan masyarakat yang berada di sekitaran Kawasan Rimbang Baling . Sector yang paling memungkinkan untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya adalah sector wisata. Wisata yang dimaksud tentu saja wisata yang mengarah kepada wisata alam atau ekowisata.

Salah satu wisata alam atau ekowisata yang harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh seluruh elemen yaitu ekowisata Batu Belah yang ada di Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Hal ini dikarenakan ada unsur sejarah dan keindahan alam yang ada dibalik ekowisata tersebut. Selain itu juga dikarenakan masyarakat setempat harus ditopang perekonomiannya dengan maksimal mengingat akses mereka yang sangat sulit untuk dijangkau pemerintah. Sehingga solusi yang paling tepat ialah dengan membangun dan memperkenalkan sektor ekowisata tersebut sehingga perekonomian masyarakat dapat terbantu dengan sendirinya.

Untuk mengetahui apakah Pengelolaan Ekowisata Batu Belah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Batu Sanggan, maka penulis telah melakukan wawancara kepada sejumlah informan yang penulis tentukan dalam sebuah kegiatan penelitian. Adapun wawancara dalam penelitian ini telah penulis sesuaikan dengan indicator yang penulis gunakan.

1. Prinsip Konservasi

Prinsip Konservasi merupakan suatu indicator dalam pengelolaan sekaligus pemanfaatannya. Hal yang dapat dilihat dalam sebuah prinsip konservasi yang dimaksud adalah:

1.1. Bentuk kerjasama dan peran aktif dari sejumlah *stakeholder* dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibuk Erfina Dora, M.T (39 th) selaku Sub bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pariwisata Provinsi Riau

“ Kerja sama Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam pengelolaan Ekowisata yang ada Di kawasan Rimbang Baling yaitu dengan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Kampar terlebih dahulu. Karena

Ekowisata yang berada Dikawasan Rimbang Baling merupakan Rumah mereka artinya Kabupaten yang lebih mengetahui apa-apa saja yang mereka butuhkan untuk pengelolaan Ekowisata tersebut. Sedangkan Provinsi berperan dalam mengawasi, menerima sejumlah data, dan membantu untuk mempromosikan secara maksimal. Dan untuk kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk Pembinaan “. (Senin,06/04)

Wawancara berlanjut dengan bapak Raden Heru (40 th) selaku Staff

Analisis Hubungan Media dan Pers Dinas Pariwisata Provinsi Riau :

“Bentuk kerjasama yang dilakukan sebagai staff analisis Hubungan Media dan Pers dalam pengelolaan Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan yaitu mempromosikan Ekowisata tersebut melalui semua media seperti facebook, Blog, Youtube bahkan ketika ada pameran wisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Riau akan mempromosikan Ekowisata tersebut”. (Senin, 06/04)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Oyong Rizal, ST (45 th) selaku Kabid Pengembangan Destinasi Wisata dari Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Kampar :

“ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar pastinya memiliki peran dalam pengelolannya. Lebih tepatnya dalam bentuk pembinaan. Sejauh ini Kabupaten belum bisa masuk dalam pengelolaan Ekowisata terutama Ekowisata yang termasuk dalam Kawasan Rimbang Baling karena kepemilikan asset Ekowisata tersebut belum jelas. Apakah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten atau kepada BBKSDA, ataupun kepada Desa Masing-masing”. (Senin, 13/04)

Hal demikian sama diutarakan oleh Perwakilan PokJa Ekowisata Batu Belah Kurniawan Efendi (25 th) sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara penulis berikut:

“ Terkait koordinasi PokJa memang terus berkoordinasi terutama dengan Kepala Desa Batu Sanggan. Namun dikarenakan keterbatasan Komunikasi membuat Koordinasi tersebut tidak begitu terjalin. Desa hanya sebatas memberi SK kepada PokJa selanjutnya PokJa lah yang mengelola secara penuh Ekowisata tersebut. Selain itu peran aktif dari masyarakat dan juga Pokja itu sendiri, seperti tetap menjaga tujuan utama dari dibukanya Ekowisata ini yaitu menjaga lingkungan yang alami dan penambahan

ekonomi. Artinya seusaha mungkin pihak-pihak yang terlibat di lokasi tersebut akan terus menjaga Ekowisata ini”. (Kamis, 18/06)

Agar lebih mendapatkan jawaban yang penulis inginkan, maka penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekaligus pedagang harian Desa Batu Sanggan yaitu ibuk Arni (33 th)

“ Selaku masyarakat, peran aktif yang terpenting dapat dilakukan dalam Pengelolaan Ekowisata Batu Belah ini adalah dengan menjaga Kawasan ini agar terjaga keasriannya terutama dari terjamahnya kunjungan para wisatawan. Sebagai masyarakat adat, masyarakat disekitaran Ekowisata ini sangat menjaga Kawasan wisata alam tersebut”. (Kamis, 18/06)

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama responden-responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama dan peran aktif dari para stakeholder dan masyarakat dapat dikatakan terjalin dengan baik. Namun antara PokJa dan Kepala Desa memang memiliki komunikasi yang kurang baik. Hal ini penulis melihat berdasarkan observasi penulis saat melakukan wawancara bahwa komunikasi tersebut kurang baik dikarenakan jarak antara Desa Batu Sanggan dengan lokasi kerja Pokja yang cukup jauh yaitu di Lipat Kain. Sementara koordinasi antara Provinsi, Kabupaten dan Desa sangat sinkron dan terjalin sesuai prosedur. Ada pihak-pihak yang juga membantu dari segi promosi Ekowisata. Selain itu peran aktif yang terjalin oleh masyarakat Desa Batu Sanggan dimana hal ini dapat penulis buktikan dengan hasil observasi pada saat penulis melakukan penelitian dimana kawasan tersebut memang terjaga kebersihan dan keasrian alamnya. Sehingga hal tersebut sesuai dengan argumen yang penulis dapatkan dari masyarakat setempat sebagai informan penulis dalam penelitian ini.

Wawancara berlanjut untuk mengetahui lebih rinci terkait Petunjuk teknis yang digunakan dalam pengelolaan Ekowisata Batu Belah tersebut.

Menurut ibu Ervina Dora, M.T (39 th) beliau mengatakan:

“ Mengenai Spesifikasi Petunjuk Teknis dalam pengelolaan kawasan Ekowisata Batu Belah di Desa Batu Sanggan lebih diberi kewenangan kepada Dinas Pariwisata & Kebudayaan yang ada di Kabupaten Kampar. sementara Dinas Pariwisata Provinsi hanya memberikan legalitas terhadap adanya kawasan Ekowisata tersebut, dan menerima bentuk laporan terhadap pengelolaannya ”. (Senin, 06/04)

Menurut Bapak Raden Heru (40 th) mengatakan bahwa :

“ Sementara ini belum ada petunjuk teknis dari pengelolaan Ekowisata Batu Belah yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Karena ekowisata ini Ekowisata Khusus. Artinya pengelolaannya lebih cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memang tergabung dalam komunitas pecinta alam ataupun Kelompok Kerja yang disebut PokJa ”. (Senin, 06/04)

Menurut Bapak Oyong Rizal, ST (45 th), beliau berpendapat bahwa :

“ Petunjuk Teknis dalam pengelolaan memang belum dibuat dalam bentuk tertulis. Semua pengelolaannya kita serahkan ke Desa Batu Sanggan. Dikarenakan kawasan Ekowisata ini mayoritas pengelolanya adalah komunitas pecinta alam bersama PokJa. Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten akan memberikan pengawasan dan pembinaan ”. (Senin, 13/04)

Berdasarkan keterangan diberikan oleh Perwakilan PokJa yang menjadi

Informan penulis Kurniawan Efendi (25 th) :

“ Petunjuk teknis belum ada diberikan baik dari Provinsi maupun dari Kabupaten. Hanya saja dalam pengelolaan, pihak PokJa mengelola sesuai dengan aturan yang PokJa tetapkan. Dimana PokJa mengelolanya sesuai dengan tujuan utama dari dibukanya Ekowisata ini. Sejak terbentuknya PokJa Batu Belah ini, baik pendanaan ataupun pengelolaannya berdasarkan gotong royong dari sesama Anggota PokJa, karena ketika pengelolaan ini diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten, mereka akan mengelola namun bersyarat dan PokJa tidak ingin pengelolaan tersebut akan merubah hakikat alam dari wisata Batu Belah ini ”. (Kamis, 18/06)

Penulis kembali melakukan wawancara kepada informan yakni untuk mengetahui pengaruh adanya Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan terhadap perekonomian Desa.

Menurut Ibu Ervina Dora, M.T (39 th), beliau mengatakan :

“ Peluang untuk menaikkan perekonoiman dari kawasan tersebut sangat tinggi jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Pihak provinsi akan membantu dalam bentuk mempromosikan sehingga dapat mendatangkan wisatawan kesana. Dan momen itu harusnya bisa menjadi salah satu peluang terbantunya ekonomi masyarakat Desa Batu Sanggan ”. (Senin, 06/04)

Menurut bapak Raden Heru (40 th), beliau mengatakan bahwa :

” Kawasan Ekowisata maupun kawasan wisata sangat berpeluang menaikkan ekonomi masyarakat. contohnya, masyarakat bisa membuat penginapan, menyiapkan transportasi yang mengangkut wisatawan dikarenakan keterbatasan akses disana, menjual kerajinan, ole-ole khas Desa, dan menawarkan barang/jasa lainnya “. (Senin, 06/04)

Menurut bapak Oyong Rizal, ST (45 th), beliau mengatakan bahwa:

“ Ekowisata ini bisa menambah penghasilan masyarakat Desa sekitaran Ekowisata. Masyarakat bisa membuka warung-warung kecil yang menjual keperluan para wisatawan ketika berkunjung ataupun berkemah disana. Selain itu menyediakan angkutan transportasi yang bisa membawa wisatawan ke area kemah ataupun Air Terjun. Sejauh ini akomodasi yang terdata masih berupa perahu-perahu dikarenakan akses yang ada masih lewat jalur air”. (Senin, 13/04)

Sedangkan menurut Perwakilan PokJa yaitu Kurniawan Efendi, (25 th) beliau mengatakan :

“ Untuk meningkatkan perekonomian memang sangat memungkinkan. Namun masyarakat disana belum mendapatkan pembinaan baik dari Provinsi maupun Kabupaten terkait apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan memanfaatkan Ekowisata tersebut. Sejauh ini masyarakat Desa memanfaatkannya hanya sebatas yang mereka mampu. PokJa mendata siapa saja yang memiliki perahu disana, kemudian mengatur rute jalannya agar setiap pemilik perahu bisa mengangkut wisatawan secara adil. Dan perahu itu sendiri memang milik pribadi mereka. Belum ada yang memang diberikan oleh Pemerintah”. (Kamis, 18/06)

Selanjutnya wawancara penulis berlanjut untuk mengetahui dana yang digunakan dalam pengelolaan dan pengembangan Ekowisata Batu Belah di Desa Batu Sanggan.

Ibu Erfina Dora M.T (39 th), mengatakan bahwa :

“Sejauh ini Provinsi memang belum menganggarkan secara khusus untuk Ekowisata Batu Belah tersebut. Bukan hanya Ekowisata tersebut namun di kawasan Ekowisata lainnya juga seperti itu. Namun jika dari pihak pengelola ingin mengelola dan mengembangkan kawasan wisatanya dengan mengajukan rincian secara lengkap, pihak Provinsi akan memproses dengan maksimal. Bantuan yang diberikan tidak harus dalam nominal uang namun dalam bentuk lainnya seperti memberikan pelatihan kepada pengelola, memberikan pembinaan kepada masyarakat dan lain sebagainya”. (Senin, 06/04)

Sedangkan menurut Bapak Raden Heru, (40 th) :

“Untuk pembiayaan pengelolaan belum dirincikan secara khusus, namun jika pengajuan bantuan dana untuk kebutuhan Ekowisata ataupun Wisata dari tiap-tiap daerah akan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi. Bantuan tidak dalam bentuk uang saja melainkan bantuan lain bisa diberikan seperti promosi. Karena cakupan promosi yang Provinsi lakukan sangat luas”. (Senin, 06/04)

Menurut Bapak Oyong Rizal (45 th), ia mengatakan bahwa:

“Bantuan dana akan diberikan jika ada pengajuan bantuan oleh pengelola ekowisata ataupun wisata di setiap Daerah yang ingin mengelola dan mengembangkan kawasan wisatanya. Namun bantuan yang diberikan bisa saja dalam berbagai bentuk. Saat ini pihak Kabupaten tidak bisa menganggarkan dana untuk Ekowisata yang kepemilikan asetnya belum jelas. Artinya Kawasan Ekowisata ataupun wisata yang memiliki kejelasan asset lah yang bisa kita perhitungkan anggarannya. Seperti contoh Muara Takus, aset Muara Takus sudah menjadi aset Nasional sehingga ada anggaran Khusus yang diberikan dalam pengelolaannya”. (Kamis, 18/04)

Menurut Perwakilan PokJa Kurniawan Efendi, (25 th) :

“Sejak diresmikannya PokJa Ekowisata ini pada tanggal 01 April 2014, pihak Desa belum ada menerima bantuan Dana yang memang khusus dianggarkan untuk pengelolaan Ekowisata, baik dari Kabupaten ataupun Provinsi. Sejauh ini Dana Desa juga belum ada dianggarkan untuk pengelolaan Ekowisata, pihak PokJa mencari sponsor-sponsor dikomunitas lainnya untuk pengelolaan ekowisata ini. Memang dari pihak pokja baru

berencana untuk mengajukan anggaran dana pengelolaannya kepada Desa di tahun 2020 ini”. (Kamis, 18/06)

1.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan didalam kehidupan masyarakat guna untuk memulai proses kegiatan social dan memperbaiki kehidupan menjadi kearah yang lebih baik. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui Bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat itu dalam bentuk apa, dan siapa yang memberikannya.

Menurut ibu Erfina Dora, M.T (39 th) ia mengatakan bahwa:

“ Pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Ekowisata tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Kabupaten. Dikarenakan kawasan Ekowisata tersebut berada didalam kewenangan mereka. Sehingga pihak provinsi tidak ingin mengambil alih secara penuh kewenangan dari Kabupaten. Namun Provinsi tetap melakukan pengawasan terhadap setiap bentuk kegiatan yang dilakukan disana”. (Senin, 06/04)

Menurut Bapak Raden Heru (40 th) :

“ Pemberdayaan yang dilakukan harusnya ada, namun dari pihak provinsi belum ada yang memberikan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat disana”. (Senin, 06/04)

Menurut Bapak Oyong Rizal, S.T (45 th) :

“Kegiatan pemberdayaan masih sebatas pembinaan-pembinaan dan pemberian arahan ketika pihak kabupaten berkunjung ke kawasan wisata tersebut, sementara untuk kegiatan rutinnya belum ada. Dikarenakan pengelolaan ini juga lebih dominan kepada Komunitas atau PokJa yang ada disana, dan Ekowisata Batu Belah tersebut juga merupakan kawasan ekowisata khusus. Jadi wisatawan yang datang juga bukan wisatawan-wisatawan yang sembarangan. Mungkin ini disebabkan karena akses juga”. (Senin, 13/04)

Sementara menurut Perwakilan PokJa Kurniawan Efendi (25 th), ia berpendapat bahwa:

“ Bentuk pemberdayaan kepada masyarakat belum terlihat dari pihak manapun. Masyarakat berinisiatif sendiri sejak dibukanya ekowisata ini. Padahal jika masyarakat diberdayakan, diberikan pembinaan dan pelatihan terkait pemanfaatan Ekowisata ini, tidak menutup kemungkinan Desa Batu Sanggan akan cepat berkembangnya. Namun PokJa telah membuat seperti program dimana Pokja membuat satu bentuk paket wisata, sehingga dari sanalah penghasilan Ekowisata ini bisa dimanfaatkan dan diputar untuk keperluan Ekowisata ini sendiri”. (Kamis, 18/06)

Dirasa belum puas terhadap jawaban-jawaban dari informan sebelumnya, penulis terus menanyakan kepada masyarakat Desa Batu Sanggan yang berprofesi sebagai pedagang disekitaran Kawasan Ekowisata yaitu ibu Arni (33 th):

“ Sebagai masyarakat dikawasan ini, belum ada yang mendapatkan program-program ataupun kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat. Mayoritas masyarakat di sini berpenghasilan sebisanya mereka saja. Jika ada wisatawan, disanalah baru masyarakat merasa terbantu ekonominya, misalnya membayar sewa perahu, penginapan dan lain sebagainya”. (Kamis, 18/06)

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada sejumlah informan yang ada terkait ada atau tidaknya pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Batu Sanggan belum diberdayakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kampar terkait pemanfaatan Ekowisata yang berada dilingkungan tempat mereka berdomisili. Sejauh ini, masyarakat hanya mampu mencari penghasilan tambahan dengan inisiatif mereka masing-masing. Dan hal itu belum ditangani secara serius oleh pihak-pihak terkait.

1.3. Seberapa Sering Kawasan Ekowisata Dijadikan Sebagai Objek Penelitian

Kawasan Ekowisata merupakan kawasan wisata yang berbasis alam. Dimana hal ini kerap menjadi suatu kawasan yang banyak diminati oleh para wisatawan dengan tujuan yang berbeda-beda. Selain itu, Ekowisata juga bisa menjadi suatu kajian atau objek dari sebuah penelitian ilmiah. Hal ini juga menjadi salah satu point yang penulis sertakan dalam penelitian penulis, sebagaimana penulis lampirkan dengan beberapa pertanyaan kepada informan-informan dalam penelitian ini.

Menurut ibuk Erfina Dora, M.T (39 th), beliau mengatakan :

“Untuk penelitian yang berkaitan dengan Ekowisata ataupun Wisata buatan memang sudah banyak. Namun fokus dari tiap-tiap penelitian berbeda-beda. Provinsi memberikan kebebasan dari setiap peneliti untuk melakukan penelitian tersebut, serta menerima masukan dari setiap hasil penelitian yang telah dilakukan”. (Senin, 06/04)

Menurut Bapak Raden Heru (40 th), mengatakan bahwa :

“Mayoritas peneliti yang tertarik untuk meneliti Ekowisata adalah dari bidang Komunikasi. Namun untuk penelitian di Kawasan Ekowisata Batu Belah itu sendiri sepertinya belum banyak. Dikarenakan keterbatasan akses yang menyulitkan sehingga kawasan tersebut jarang dijadikan sebagai objek penelitian”. (Senin, 06/04)

Menurut Bapak Oyong Rizal, S.T (45 th), mengatakan bahwa :

“Kawasan Ekowisata Batu Belah ini terbilang kawasan yang masih baru dalam tahap pengelolaannya. Wisatawan yang datang kesana juga wisatawan-wisatawan khusus. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa disana banyak objek-objek yang bisa dijadikan kajian ilmiah”. (Senin, 13/04)

Menurut Kurniawan Efendi (25 th) selaku Perwakilan PokJa Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan, mengatakan bahwa :

“Seberapa sering Ekowisata ini dijadikan lokasi penelitian masih belum bisa dikatakan sering, namun ada beberapa kali. Hal ini bisa dikarenakan akses yang cukup sulit untuk sampai ke Ekowisatanya sendiri. Ekowisata Batu Belah ini sebenarnya cukup menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian dikarenakan ada banyak potensi yang masih belum tersentuh oleh pihak-pihak tertentu sehingga sangat berpengaruh terhadap kemajuan Desa Batu Sanggan juga Masyarakatnya. Sebagai PokJa kami tetap berusaha akan terus mengelola ekowisata ini sehingga dapat menarik para wisatawan maupun para peneliti dari luar sana”. (Kamis, 18/06)

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ekowisata Batu Belah ini juga menjadi salah satu kawasan yang menarik untuk dijadikan kajian penelitian. Dikarenakan kawasan tersebut masih alami dan terjaga keasriannya. Selain itu potensi perekonomian yang bisa berkembang menjadi lebih baik jika saja dari sebuah hasil penelitian menghasilkan saran maupun masukan kepada pihak Pemerintah setempat maupun Pemerintah Provinsi. Hal ini sesuai dengan observasi penulis ketika penulis mendatangi langsung Ekowisata Batu Belah di Desa Batu Sanggan. Penulis mengamati situasi disana, ada potensi untuk memajukan Desa tersebut dengan memanfaatkan alam yang mereka punya. Khususnya memanfaatkan Ekowisata tersebut. Dari sana, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan tambahan sebagai Desa Wisata yang berbasis alam.

2. Managemen Operasional

Managemen Operasional merupakan suatu usaha pengelolaan yang dilakukan secara maksimal dengan memanfaatkan segala elemen-elemen yang ada. Dalam penelitian ini, penulisi memfokuskan kepada :

2.1 Tujuan dari Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan

Adapun dalam Pengelolaan Ekowisata ini, ada tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dapat penulis uraikan berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama sejumlah informan-informan dalam penelitian ini.

Menurut ibu Erfina Dora, M.T, yang menyatakan bahwa :

“ Tujuan Ekowisata pada umumnya sama dalam hal menciptakan wisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Sama seperti Batu Belah ini. Terlebih ekowisata Batu Belah merupakan wisata alam sekaligus wisata sejarah. Sehingga tujuan utamanya pasti untuk menjaga kelestarian lingkungan. dan hal ini juga memiliki potensi-potensi lainnya yang mendukung”. (Senin, 06/04)

Menurut Bapak Raden Heru (40 th) mengatakan bahwa:

“ Tujuan tempat wisata pada umumnya adalah untuk menciptakan potensi ekonomi dengan memanfaatkan kelebihan atau ciri khas dari tiap-tiap tempat wisata. Ekowisata merupakan tempat berwisata alami atau wisata alam. Tujuannya adalah sebagai edukasi, menjaga budaya dan adat istiadat setempat, pelestarian lingkungan, dan memperkenalkan keunikan dan kekayaan dari alam tersebut”. (Senin, 06/04)

Menurut Bapak Oyong Rizal (45 th) yang mengatakan bahwa :

“ Ekowisata Batu Belah memiliki tujuan sebagai bentuk menjaga alam sekaligus menjadikan potensi agar perekonomian di Desa yang berpotensi Wisata menjadi lebih tersokong”. (Senin, 13/04)

Menurut Perwakilan Pokja Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan,

Kurniawan Efendi (25 th) :

“ Tujuan dari Pengelolaan Ekowisata Batu Belah ini adalah untuk mengedepankan wisata berbasis alam. Karena sudah terlalu banyak wisata-wisata buatan, dengan memanfaatkan potensi alam dan nilai sejarah yang ada di Desa Batu Sanggan ini maka kita ingin wisata ini mampu untuk menjadi Ekowisata yang diminati. Sekaligus dengan berkembangnya Ekowisata ini, maka bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Sanggan”. (Kamis, 18/06)

Menurut masyarakat Desa Batu Sanggan yang berprofesi sebagai Pedagang di sekitaran Kawasan Ekowisata, ibu Arni (33 th) :

“ Tujuan utamanya menurut kami pastinya untuk kebutuhan wisata. Karena kondisi Desa ini sangat asri dan kaya dengan alamnya, dan membantu menaikkan ekonomi masyarakat sekitar, maka ini yang dijadikan wisata oleh kelompok kerja yang ada di Desa Batu Sanggan ini”. (Kamis, 18/06)

Wawancara penulis terus berlanjut untuk menanyakan tujuan tersebut apakah telah tercapai dengan baik atau belum dalam pengelolaan Ekowisata Batu Belah di Desa Batu Sanggan.

Dalam mengelola suatu kawasan baik kawasan wisata alam maupun wisata buatan pastinya berorientasi kepada tujuan dibukanya kawasan tersebut. Sebagaimana hal ini juga penulis uraikan dalam hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama informan-informan yang ada dalam penelitian ini.

Menurut ibu Erfina Dora, M.T (39 th), berpendapat bahwa :

“ Ekowisata merupakan wisata khusus, yakni wisata yang berbasis alam. Artinya wisata ini sangat berbeda dengan wisata-wisata buatan. Tujuannya juga pasti berbeda. Ekowisata Batu Belah ini cenderung dikelola oleh PokJa dan komunitas-komunitas yang memang mencintai alam. Pastinya setiap wisatawan yang berkunjung disana juga sudah mengetahui hal-hal yang dilarang ataupun yang diperbolehkan jika berwisata kesana. Dan harusnya dalam pengelolaan mereka sudah berorientasi pada tujuan yang telah dibuat”. (Senin, 06/04)

Menurut bapak Raden Heru (40 th), mengatakan bahwa :

“ Tujuan dari dibukanya Ekowisata adalah memberikan warna baru kepada para wisatawan yang sudah jenuh dengan wisata-wisata buatan. Dengan mengedepankan lingkungan alam yang memang ada atau menjadi ciri khas dari suatu Daerah. Pastinya setiap pengelolaan yang dijalankan bersesuaian dengan tujuan yang sudah ada sehingga Ekowisata tersebut terus ada dan semakin berkembang. Sama seperti Ekowisata Batu Belah yang ada di Desa Batu Sanggan”. (Senin, 06/04)

Sementara menurut bapak Oyong Rizal, S.T (45 th), mengatakan bahwa :

“ Tujuan Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan sejatinya ada 2 yaitu menjaga alam dan juga Ekonomi. Hingga saat ini kedua tujuan tersebut telah tercapai namun belum maksimal. Masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dan menjadi tugas dari Kabupaten Kampar”. (Senin, 13/04)

Berdasarkan jawaban yang penulis dapatkan dari Perwakilan PokJa

Ekowisata Batu Belah, Kurniawan Efendi (25 th), ia berpendapat bahwa :

“ Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan memiliki 2 tujuan utama yaitu menjaga alam serta meningkatkan perekonomian. Dengan adanya Ekowisata kekayaan alam bisa terjaga dan terus lestari sehingga wisata yang ditawarkan menjadi wisata yang alami. Namun setiap yang berwisata disana harus mengikuti aturan yang dibuat oleh PokJa agar tujuan yang pertama itu bisa tercapai. Dengan adanya ekowisata juga perekonomian masyarakat harusnya bisa terbantu. Misalnya dengan menawarkan jasa ataupun barang. Dengan demikian sedikit demi sedikit Desa yang memiliki potensi wisata bisa berkembang. Namun saat ini situasinya berbeda dikarenakan akses yang sulit untuk mencapai Ekowisata Batu Belah ini, sehingga tujuan ekonominya bisa dibilang tercapai namun belum maksimal”. (Kamis, 18/06)

Menurut masyarakat sekitaran Desa Batu Sanggan yang berprofesi sebagai pedagang, ibu Arni (33 th) mengatakan :

“ Kalau untuk tujuan Ekonomi masih belum terlalu pesat meningkatnya, namun sedikit banyaknya masyarakat ada penghasilan tambahan dari Ekowisata ini. Hanya saja jumlah pengunjung yang terkadang tidak tentu. Jika banyak alhamdulillah, jika sepi ya masyarakat juga akan berdampak”. (Kamis, 18/06)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dibukanya Ekowisata Batu Belah ini ada 2 yakni tujuan untuk menjaga alam dan lingkungan, dan tujuan untuk meningkatkan ekonomi. Tujuan yang pertama tercapai karena PokJa itu sendiri memiliki aturan khusus yang harus ditaati oleh setiap pengunjung atau wisatawan sehingga tujuan untuk menjaga alam itu bisa terwujud. Sedangkan tujuan yang kedua belum tercapai secara maksimal dikarenakan faktor

wisatawan yang juga tidak menentu. Sehingga jika masyarakat hanya mengandalkan Ekowisata saja perekonomian mereka tidak akan terbantu. Namun ada kemungkinan perekonomian mereka bisa meningkat jika Ekowisata itu memang benar-benar dikelola dan dikembangkan dengan baik sehingga dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat-masyarakat disekitaran Ekowisata Batu Belah.

2.2 Promosi yang dilakukan oleh Pengelola Kawasan Ekowisata agar dapat menarik minat pendatang luar

Untuk menjadikan suatu Kawasan atau Daerah agar menjadi lebih cepat maju khususnya Kawasan-kawasan yang memiliki potensi wisata dan juga potensi ekonomi, maka perlu adanya dilakukan tahapan pengenalan atau promosi. Promosi tersebut bisa dilakukan dari semua elemen yang terlibat. Tujuannya agar upaya untuk mengembangkan Ekowisata itu bisa lebih maksimal. Sebagaimana penulis juga menanyakan hal demikian guna memperkuat penelitian penulis.

Menurut Ibu Erfina Dora, M.T (39 th) dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau, beliau mengatakan:

“ Sebagai Dinas Provinsi yang memang berwenang untuk mengurus pariwisata & kebudayaan yang ada di Provinsi Riau tentunya kita bertugas untuk bagaimana agar wisata dan budaya yang kita punya itu bisa cepat untuk dikenal baik dalam ataupun luar daerah. bahkan sampai internasional. Disanalah fungsinya kita untuk mempromosikan suatu potensi dari tiap-tiap Daerah”. (Senin, 06/04)

Menurut bapak Raden Heru (40 th) selaku staff analisis media dan pers Dinas Pariwisata Provinsi Riau yang mengatakan :

“ Promosi terus dilakukan baik dari Dinas Provinsi, Kabupaten maupun dari Desa dan Komunitas-komunitas yang ada. Promosi ini dilakukan secara terus menerus tujuannya agar Ekowisata ini cepat untuk dikenal oleh wisatawan luar”. (Senin 06/04)

Menurut bapak Oyong Rizal, S.T (45 th) mengatakan bahwa :

“ Setiap objek wisata ataupun Ekowisata yang sudah mendaftarkan data daerah wisata tersebut kepada Kabupaten pastinya akan kita bantu pengembangannya dengan cara mempromosikannya. Maka dari itu perlu kiranya suatu Kawasan wisata tersebut memberikan informasi lengkap kepada Dinas terkait agar mudah untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Salah satunya bantuan berupa Promosi. Karena Dinas akan berkerjasama dengan media sehingga akan lebih cepat untuk mempromosikan Kawasan atau Ekowisata tersebut”. (Senin, 13/04)

Perwakilan PokJa Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan, Kurniawan

Efendi (25 th) :

“ Sejak awal diresmikannya PokJa Batu Belah di Desa Batu Sanggan ini mulailah banyak komunitas-komunitas pecinta alam yang berdatangan ke sini. Dari sanalah promosi Ekowisata mulai gencar dilakukan. Dengan promosi kami percaya sedikit demi sedikit perubahan akan terjadi di Ekowisata ini. Tinggal bagaimana pengelolaannya saja yang harus dimaksimalkan. Sebagai PokJa kami tentunya berharap agar Dinas terkait bisa terus mempromosikan Ekowisata ini secara terus menerus sehingga Ekowisata ini pesat pengembangannya”. (Kamis, 18/06)

Dirasa belum cukup untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang penulis inginkan, maka penulis melanjutkan wawancara dengan focus kepada media yang digunakan dalam kegiatan promosi Ekowisata ini sehingga dapat menarik minat dari pendatang untuk berkunjung maupun berkemah di Ekowisata Batu Belah di Desa Batu Sanggan.

Ibu Erfina Dora, M.T (39 th) mengatakan :

“ Promosi yang dilakukan biasanya melalui situs resmi Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Facebook, Youtube dan media local. Selain itu kita juga

memanfaatkan jasa Endorse dari selebriti dengan mengadakan paket wisata dan kemudian wisata tersebut dipromosikan melalui paket tersebut “. (Senin, 06/04)

Sementara bapak Raden Heru (40 th) selaku staff analisis Media dan Pers Dinas Pariwisata Provinsi Riau mengatakan:

“ Staff Analisis Media dan Pers Provinsi gencar untuk terus melakukan promosi terkait semua objek wisata yang ada di Provinsi Riau ini. Khususnya wisata-wisata yang memang sudah terdaftar di Dina Pariwisata Provinsi. Promosi kita lakukan dengan menggunakan media online ataupun media cetak. Dari radio maupun TV local. Selain itu kita melakukan pameran rutin setahun sekali. Tujuannya adalah untuk mempromosikan semua kebudayaan ataupun wisata yang ada di Riau. Bekerjasama dengan komunitas-komunitas, Genpi , LSM, Pokja-Pokja yang dibentuk di tiap-tiap Kawasan wisata”. (Senin, 06/04)

Menurut bapak Oyong Rizal, S.T (45 th) :

“ Promosi dilakukan melalui media-media seperti Youtube, Facebook, Blog, ataupun promosi melalui kegiatan langsung. Melalui media cetak seperti brosur-brosur dan koran. Target promosi tentunya kepada semua elemen masyarakat, komunitas ataupun kelompok-kelompok pecinta alam lainnya “. (Senin, 13/04)

Menurut Perwakilan PokJa Kurniawan Efendi (25 th) :

“ Ekowisata ini terbilang masih baru dan belum begitu terdengar hingga keluar daerah. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya infrastruktur listrik dan jaringan seluler. Namun hal tersebut tidak mengurangi usaha dari kita untuk terus mempromosikannya. Kami selalu mendapatkan masukan maupun memulai inovasi baru terkait cara mempromosikan Ekowisata Batu Belah ini. Dinas Pariwisata dari Provinsi yang paling gencar terlihat dalam mempromosikannya “. (Kamis, 18/06)

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan mengenai Promosi Ekowisata yang mampu mempengaruhi Pengembangan Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mengembangkan Ekowisata tersebut sudah dilakukan oleh semua elemen yang terlibat dalam pengelolaan dan Pengembangan Ekowisata Batu Belah. Meskipun penulis belum begitu melihat perubahan yang signifikan terhadap perkembangannya,

namun upaya tersebut dirasa mampu untuk membuat Desa Batu Sanggan menjadi lebih dikenal dengan wisata alam dan sejarah yang ada disana. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, memang kesulitan mendapatkan jaringan seluler dan listrik menjadi penyebab sulitnya masyarakat ataupun wisatawan yang sedang berada disana untuk langsung mempromosikan melalui media. Tetapi promosi bisa dilakukan ketika sudah keluar dari Desa Batu Sanggan. Seperti contoh saat penulis mencoba mencari informasi wisata yaitu dengan mencoba melalui media-media yang sudah mempromosikan Ekowisata tersebut, memang penulis sangat mudah untuk menemukannya. Dan hal ini cukup membuktikan bahwa untuk upaya promosi sudah berjalan kendati masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan melalui tindakan yang berinovasi sehingga lebih maksimal. Dan jika pengunjung sangat ramai berdatangan ke Ekowisata tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang berada disekitaran Kawasan Ekowisata Batu Belah.

2.3 Sikap dan partisipasi dari penduduk local terhadap keberadaan Ekowisata

Peran serta dari masyarakat yang berada didalam satu Kawasan Ekowisata tersebut memang sangat penting dan memberikan pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan Ekowisata yang ada. jika pengelolaan tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat tentu saja pengelolaan tersebut tidak akan bisa diteruskan. Dan potensi yang dimiliki Desa akan terbuang secara cuma-cuma ataupun sia-sia.

Maka penulis ingin mengetahui bagaimana peran dan keterlibatan masyarakat yang ada di Desa Batu Sanggan terhadap keberadaan Ekowisata Batu Belah.

Menurut ibu Erfina Dora (39 th) :

“ Pastinya masyarakat sangat mendukung dengan adanya Ekowisata di Desa mereka. Hal ini tentunya menjadi salah satu peluang bagi masyarakat Desa Batu Sanggan untuk menambah dan meningkatkan perekonomian mereka “. (Senin, 06/04)

Menurut bapak Raden Heru (40 th) :

“ Jika masyarakat tidak mendukung maka Ekowisata tersebut tidak akan semakin berkembang seperti saat ini. Ekowisata tersebut dikelola dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada masyarakat yang akan dirugikan dari keberadaan Ekowisata tersebut “. (Senin, 06/04)

Menurut bapak Oyong Rizal, S.T (45 th):

“ Masyarakat Desa Batu Sanggan sangat berperan terhadap keberlangsungan Ekowisata tersebut. Bahkan masyarakat juga terlibat didalam jalannya Ekowisata itu. Contoh, masyarakat mempunyai perahu sebagai transportasi mereka, dan hal itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah penghasilan. Hal ini pastinya sangat membuktikan bahwa mereka sangat mendukung jika pengelolaan Ekowisata itu semakin dikembangkan dengan baik “. (Senin, 13/04)

Sedangkan menurut Perwakilan PokJa Kurniawan Efendi (25 th) mengatakan :

“Masyarakat memang berperan. Namun peran mereka atas dasar inisiatif mereka masing-masing. Masyarakat Desa sangat menjaga Kawasan Ekowisata ini sehingga tidak ada yang dirubah dengan sengaja dan tidak mengurangi hakikat wisata alam yang sesungguhnya. Dengan menjaga seperti itu saja sudah merupakan keterlibatan yang penuh dari masyarakat. Selain itu masyarakat juga sangat menjaga adat istiadat dengan baik, sehingga membuat para wisatawan sangat menghargai keberadaan mereka. Disamping itu masyarakat juga memanfaatkan peluang itu untuk menawarkan jasa/barang

sehingga dapat menjadi salah satu mata pencaharian mereka. Dan sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap kemajuan Desa”. (Kamis, 18/06)

Menurut Masyarakat Desa Batu Sanggan ibu Arni (33 th), mengatakan :

“ Kami sangat menjaga Kawasan ini agar terus terjaga alamnya. Memberikan kenyamanan kepada pengunjung atau wisatawan. Kami sangat mendukung jika Ekowisata ini lebih diberi perhatian oleh Pemerintah. Karena potensi alam disini sangat banyak. Selain itu terselip sejarah yang menjadikannya sebagai ciri khas Desa ini. Dari Kawasan Ekowisata ini kami yakin perekonomian bisa bertambah dan terbantu jika Pemerintah serius dalam membantu mengelolanya “. (Kamis 18/06)

Dari hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Batu Sanggan sangat memiliki peran terhadap keberlangsungan Ekowisata ini sampai sekarang. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat setempat, tentunya sangat sulit untuk membuat Ekowisata tersebut menjadi lebih baik dan terkelola. Hanya saja perlu adanya sentuhan Pemerintah agar semuanya dapat berjalan dengan maksimal. Karena masyarakat sendiri sangat yakin bahwa potensi ekowisata yang dimiliki mampu meningkatkan perekonomian mereka dan membuat Desa Batu Sanggan menjadi lebih berkembang dan bisa maju dari sebelumnya.

C. Faktor pendukung dalam Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Dalam jalannya pengelolaan Ekowisata tersebut tentunya ada factor yang mendukung terhadap pengelolaannya sebagaimana penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan dalam penelitian ini.

Menurut ibu Erfina Dora (39 th) :

“Faktor pendukung dalam pengelolaan Ekowisata ini yaitu peran Pemerintah. Pemerintah Provinsi memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola secara penuh kekayaan alam yang mereka miliki. Selain itu pengawasan dan pembinaan dari Provinsi tetap dilakukan, bahkan Provinsi akan siap membantu agar Ekowisata tersebut terpenuhi dengan kebutuhan layanan, akses, infrastruktur dan sebagainya”. (Senin,06/04)

Menurut Raden Heru (40 th):

“ Peran Dinas Pariwisata Provinsi dalam bantuan Promosi juga menjadi salah satu factor pendukung dari pengelolaannya. Pembinaan dari Kabupaten, peran sejumlah stakeholder termasuk keterbukaan masyarakat tentunya menjadi pendukung utama dalam pengelolaan Ekowisata tersebut. Peran media juga, tanpa adanya media, promosi juga tidak akan cepat berkembang di masyarakat luas”. (Senin,06/04)

Menurut Bapak Oyong Rizal (45 th):

“Pemerintah Kabupaten pastinya selalu memberikan ruang kepada setiap Daerah yang memiliki potensi untuk dilakukan pembinaan, diberdayakan dan dibangun guna meningkatkan kemajuan Kabupaten Kampar ini sendiri. Sama halnya dengan peran Pemerintah Kabupaten terutama Dinas Paariwisata & Kebudayaan Kabupaten Kampar terhadap pengelolaan Ekowisata Batu Belah”. (Senin,13/04)

Menurut perwakilan PokJa Batu Belah Kurniawan Efendi (25 th):

“Faktor pendukung bagi kami adalah kerjasama masyarakat. Bagi kami masyarakat di Desa Batu Sanggan sangat terbuka dengan adanya Ekowisata ini. Mereka mau membantu menjaga alam Batu Sanggan dengan baik. Dan sama-sama membantu untuk memberikan kenyamanan kepada setiap pengunjung atau wisatawan. Yang kedua adalah Komunitas pecinta alam, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang mau membantu mempromosikan Ekowisata Batu Belah ini. Meskipun seharusnya peran Pemerintah tidak hanya sebatas promosi saja namun dalam bentuk pembinaan, pengawasan dan memberdayakan masyarakat belum dilakukan dengan baik, tapi kami sangat merasa sedikit terbantu dengan adanya peran terhadap promosi tersebut”. (Kamis, 18/06)

Menurut ibu Arni (33 th):

“Faktor pendukung yaitu peran dari pengelola Ekowisata setempat. Tanpa peran mereka pastinya Ekowisata ini tidak terkelola dengan baik seperti sekarang ini”. (Kamis, 18/06)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa factor pendukung dari pengelolaan Ekowisata Batu Belah ini adalah sebagai berikut:

1. Peran dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam bentuk promosi. Meskipun peran yang dimaksud hanya sebatas Promosi saja namun, hal ini menjadi salah satu factor pendukung dari pengelolaan Ekowisata Batu Belah yang ada di Desa Batu Sanggan.
2. Peran masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sangat membantu dalam menjaga keasrian lingkungan Desa Batu Sanggan sekaligus membantu PokJa dalam setiap kegiatan pengelolaannya. Dan masyarakat juga memberikan kenyamanan kepada wisatawan sehingga membuat wisatawan betah berwisata alam disana.
3. Peran Media, dengan media maka promosi yang dilakukan sangat cepat berkembang dimasyarakat. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah wisatawan yang datang ke Ekowisata Batu Belah.

D. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Ekowisata Batu Belah Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Dalam pengelolaan Ekowisata pastinya mengalami kesulitan, sehingga Ekowisata Batu Belah ini belum terkelola dengan maksimal. Hambatan-hambatan yang penulis temukan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan-informan yang ada sebagaimana penulis uraikan sebagai berikut :

Menurut ibu Erfina Dora (39 th):

“Yang menjadi factor penghambat utama adalah akses. Karena suatu Kawasan wisata bisa berkembang dengan baik apabila akses nya mudah untuk dilewati oleh wisatawan. Sementara untuk ke Eowisata Batu Belah aksesnya terbilang sulit. Wisatawan harus melewati jalur darat yang sangat jelek sekali ataupun melewati jalur air dengan resiko yang terbilang besar”. (Senin, 06/04)

Menurut Bapak Raden Heru (40 th):

“Mengenai faktor penghambat dalam pengelolaan pastinya pihak Desa yang lebih paham apa-apa saja yang mengambat mereka dalam melaksanakan pengelolaan Ekowisata tersebut. Namun secara umum yang bisa kami gambarkan adalah berkaitan dengan akses, infrastruktur pendukung Ekowisata, listrik. 3 hal tersebut digambarkan berdasarkan lokasi Desa Batu Sanggan yang cukup terisolir”. (Senin, 06/04)

Menurut Bapak Oyong Rizal (45 th):

“Kendala utama yang kita temukan dalam pengelolaan Ekowisata Batu Belah yaitu listrik dan aturan mengenai pengelolaan Ekowisata tersebut. Listrik sangat berpengaruh terhadap aktivitas disana. Sementara saat ini karena listrik terbilang sulit maka terbatas pula aktivitas pengelola. Kemudian tidak adanya aturan yang bisa menjadi landasan dalam pengelolaan. Hal ini berakibat terhadap sistim yang dijalankan oleh si pengelola”. (Senin, 13/04)

Menurut perwakilan PokJa Ekowisata Batu Belah Kurniawan Efendi (25 th) mengatakan:

“Yang menjadi penghambat sebenarnya sangat banyak. Mulai dari akses, sarana dan prasarana yang ada di Ekowisata ini, listrik dan jaringan, Dana/anggaran, hingga kurangnya peran pemerintah terhadap Ekowisata ini. Baik Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Daerah, adapun jika pengelolaan ini melibatkan Pemerintah, pihak pemerintah mau terlibat namun bersyarat. Pokja akan dirubah menjadi PokDarWis dan aset yang dimiliki diserahkan atas nama Kabupaten. Sehingga pengelolaan ini masih sebatas inisiatif dari Pokja saja karena kami tidak mau Ekowisata ini justru akan berubah hakikat alamnya. Bentuk-bentuk kegiatan yang bisa mendukung pengelolaan ini yang diberikan oleh pemerintah hingga saat ini belum ada”. (Kamis, 18/06)

Menurut ibu Arni (33 th) selaku perwakilan masyarakat sekaligus pedagang disekitaran Ekowisata:

“Faktor penghambat yang paling berpengaruh adalah jalan menuju Ekowisata yang hancur dan juga transportasi yg cukup mahal. Kemudian kesulitan akan listrik. hal ini yang sering dikeluhkan oleh pengunjung”.
(Kamis, 18/06)

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan Ekowisata Batu Belah di Desa Batu Sanggan adalah sebagai berikut:

1. Akses yang sulit untuk sampai ke Kawasan Ekowisata. Wisatawan sulit untuk sampai ke lokasi dengan mudah. Mereka harus melewati akses sungai yang terjal karena rutenya melawan arus sungai Subayang. Kemudian biaya transportasi perahu yang cukup mahal. Maka hal ini juga menjadi kendala yang berpengaruh terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung ke Ekowisata.
2. Infrastruktur yang belum memadai seperti Listrik. Berdasarkan jawaban yang penulis dapatkan dari PokJa setempat, Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar belum mendukung Ekowisata ini dengan fasilitas. Memang Pemerintah Daerah menginginkan agar ekowisata ini dikelola penuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, agar semuanya bisa difasilitasi dan menjadi Ekowisata pilihan Kabupaten. Namun, hal tersebut juga berdasarkan syarat yaitu PokJa untuk mau diubah menjadi PokDarWis. Sementara dari pihak PokJa keberatan jika semua dikelola oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dikarenakan Pokja ingin Ekowisata ini murni menjadi Ekowisata yang asri. Mereka takut jika Ekowisata ini dikelola penuh oleh badan/instansi maka hakikat alamnya akan berubah. Hal ini menjadi kendala atau hambatan terhadap kemajuan Ekowisata itu sendiri.

3. Tidak adanya anggaran khusus dari Desa untuk mengelola Ekowisata ini. Sehingga untuk mengembangkan Ekowisata tersebut terkendala dengan biaya. Biaya yang ada merupakan hasil olahan PokJa yang berasal dari iuran anggota PokJa dan biaya yang dikenakan kepada Wisatawan yang berdatangan.
4. Belum adanya perhatian penuh dari pemerintah khususnya pemerintah daerah kabupaten kampar untuk memberdayakan masyarakat sekitaran Ekowisata. Sehingga masyarakat tidak terlalu paham bagaimana memaksimalkan Ekowisata yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

BAB VI

PENUTUP

b. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai uraian hasil selama penelitian ini berlangsung. Adapun dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Ekowisata Batu Belah sudah dikelola cukup baik oleh PokJa setempat namun tidak oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Dalam pengelolaan masih terdapat beberapa kekurangan. Ekowisata Batu Belah memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. hanya saja peran Pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Seperti masyarakat diberdayakan dan pengelola harus dibina secara penuh sehingga dalam pengelolaan Ekowisata akan semakin baik..
2. Faktor pendukung dalam pengelolaan Ekowisata Batu Belah adalah keterlibatan Pemerintah dalam kegiatan promosi. Namun peran Pemerintah harusnya tidak hanya berkaitan dengan promosi saja, Peran Media, kemudian sikap keterbukaan masyarakat terhadap pengelolaan Ekowisata yang dikelola oleh PokJa, dan partisipasi PokJa yang berinisiatif terhadap pengelolaannya agar tidak merusak hakikat alam Desa Batu Sanggan dari awal terbentuk hingga berjalan di tahun 2020.
3. Faktor penghambat dalam Pengelolaan Ekowisata Batu Belah adalah keterbatasan aturan yang berkaitan dengan pengelolaan Ekowisata di

Kabupaten Kampar, keterlibatan Pemerintah terkait pemberdayaan dan pembinaan, Peran Pemerintah Desa dalam menyiapkan anggaran Desa untuk jalannya pengelolaan, akses, dan infrastruktur pendukung pengelolaan seperti listrik.

c. Saran

1. Sebaiknya pihak PokJa, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lebih bersinergi dan lebih mengerti bagaimana tanggungjawabnya untuk mengelola Ekowisata Batu Belah agar Ekowisata Batu Belah ini dapat berkembang dengan cepat dan bisa menjadi Ekowisata yang semana mestinya yang sesuai dengan standar nya Ekowisata yang ada.
2. Sebaiknya antara Pemerintah Provinsi dan khususnya Pemerintah Kabupaten lebih memberikan perhatian kepada Desa Batu Sanggan karena disana kaya akan potensi alamnya yang bisa mensejahterakan masyarakat Desa. Masyarakat harusnya lebih diberdayakan sehingga perkembangan dan kemajuan Desa lebih cepat. Dan Pemerintah Kabupaten harusnya cepat untuk memperbaiki akses, listrik dan infrastruktur lain agar Ekowisata ini lebih diminati karena mudah dijangkau dan resiko yg didapat oleh wisatawan tidak terlalu besar dan berdampak terhadap wisatawan yang akan berkunjung.
3. Sebaiknya pihak Desa juga menyediakan anggaran rutin yang bisa diambil dari dana Desa untuk pengelolaan Ekowisata sehingga permasalahan biaya tidak lagi menjadi kesulitan utama dari pengelolaan Ekowisata Batu Belah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Suryono. 2001. "Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial".
- Adisamita, Raharjo. 2011. "Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan". Yogyakarta. Graha Ilmu
- Awang, Azam dan Mendra Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru. Alaf Riau
- Damanik, Janianton dan Weber, Helmut. 2006. *Perencanaan Ekowisata Dari Teori Ke Aplikasi*. Yogyakarta: PUSPAR UGM Dan Andi .
- Effendi, Bachtiar. 2002. "Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan". Uhaiindo dan Offset, Yogyakarta
- George R. Terry, 2000. "Prinsip-prinsip Manajemen". Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu, 2004. "Managemen" Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Handoko, T. Hani, 2008. *Managemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Liberty
- Hanif, Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Hayat. 2001. "Pengelolaan Ekowisata Desa". Inteligencia Media. Malang.
- Kansil, CTS, dan Cristinie, 2003. "Pemerintahan Indonesia". Balai Pustaka, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2001. *Kybernologi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta. Rineka Cipta.

- _____, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rasyid, M. Ryaas, 2000. “Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah”. Jakarta:LP3ES
- Rauf, Rahyunir, Sri, Maulidiah, 2015. “Pemerintahan Desa”. Zanafa Publishing, Pekanbaru
- R.Wayne Mondy, Shane R Premeaux, 1995. “Managemen: Concepts, Practice, and Skills: Surfing For Succes In Business”. Prentice Hall.
- Soetomo, 2009. “Pembangunan Masyarakat”. Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Spillance, James. 2001. “Pariwisata dan Wisata Budaya”. CV: Raja wali
- Suharto, Edi, 2010.” Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”. Refika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. “*Pengantar Ilmu Pemerintahan* ”. Refika Aditama. Bandung.
- _____, 2013. “*Ilmu Pemerintahan*”. Refika Aditama, Bandung.
- Thoha, Miftah. 1995. “ *Kepemimpinan Dalam Managemen: suatu pendekatan perilaku* ”. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wasistono, Sadu dan Tahir, Irwan. 2006. “*Prospek Pengembangan Desa*”. Bandung. CV. Fokusmedia
- _____, 2006. “Prospek Pengembangan Desa”. Fokus Media, Bandung.
- _____,2003. “Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Fokus Media, Bandung
- Widjaja,HAW.2003. “*Otonomi Desa*”. Jakarta. PT.Rajagrafindo Persada

Yoeti, O.A. 2000. *“Ekowisata Parawisata Berwawasan Lingkungan Hidup”*.

Jakarta. Pertja

Yusoff, Agus, dan Andi, Yusran, 2007. *“Desentralisasi Di Indonesia”*.

Pekanbaru-Riau. Red PoSt Prees.

Jurnal :

PEMBANGUNAN DESA-KOTA DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MIGRASI. Jurnal Ilmu
Pemerintahan Nakhoda, 15(26), 124-135.

(2018). Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. WEDANA: Jurnal Kajian
Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 4(1), 503-512. Pekanbaru, Riau.

Mulianto, B. (2018). PEMBANGUNAN DESA DALAM TINJAUAN
PEMIKIRAN WOOLCOCK DAN NARAYAN. WEDANA: Jurnal Kajian
Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 3(2), 419-428.

Erlin Darmayanti, Mochammad Saleh Society, Heru Ribawanto “Model
Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi
Daerah Studi Kasus Provinsi DIY”. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4.
No. 3, Desember 2014: 271-286.

Erda Fitriani, Selinaswati, Desy Mardiah “Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Ekowisata Sungai Pinang Studi Kasus : Nagari Sungai
Pinang Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera
Barat”. Jurnal Socius Vol. 4. No. 2 Tahun 2017.

Gilang Pamungkas “Ekowisata Belum Milik Bersama: Kapasitas Jejaring Stakeholder Dalam Pengelolaan Ekowisata (Studi Kasus: Taman Nasional Gunung Gede Pangrango)”. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* Vol. 21. No. 1 April 2010.

I Wayan Runa “Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana Untuk Kegiatan Ekowisata”. *Jurnal Kajian Bali* Vol. 02. No. 01, April 2012.

Dokument :

- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah